

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II

2023



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga Balai Besar POM di Jakarta dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Triwulan II Tahun 2023. Laporan Kinerja dibuat secara berkala dan merupakan bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas instansi terkait tugas perlindungan kepada masyarakat terhadap obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam pencapaian target kinerja.

Pencapaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta diukur terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2023, yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme, perlindungan masyarakat dan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Pengukuran capaian kinerja juga dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini terhadap target tahun 2023 (periode renstra 2020-2024), evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan gambaran akurat atas kinerja Balai Besar POM di Jakarta dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memenuhi target yang telah ditetapkan bagi Balai Besar POM di Jakarta serta dapat memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Balai Besar POM di Jakarta di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 20 Juli 2023

Kepala Balai Besar POM di Jakarta



Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis triwulan II pada tahun 2023 yang mengacu pada Reviu Renstra BBPOM di Jakarta tahun 2021-2024 yang terdiri dari 11 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja utama. Sasaran strategis “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta” dengan capaian sebesar 100,37% dengan kriteria **“MEMENUHI EKSPEKTASI”**.

1. Sasaran strategis “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”, belum ada capaian pada triwulan II, nilai akan muncul pada akhir tahun 2023.
2. Sasaran strategis “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”, belum ada capaian pada triwulan II, nilai akan muncul pada akhir tahun 2023.
3. Sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” dengan capaian sebesar 117,47% dengan kriteria **“MEMENUHI EKSPEKTASI”**
4. Sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” dengan capaian sebesar 101,79% dengan kriteria **“MEMENUHI EKSPEKTASI”**
5. Sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”, dengan capaian sebesar 113,39% dengan kriteria **“MEMENUHI EKSPEKTASI”**
6. Sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”, dengan capaian sebesar 150,03% dengan kriteria **“TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”**
7. Sasaran strategis “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal”, belum ada capaian pada triwulan II nilai akan muncul pada akhir tahun 2023.
8. Sasaran strategis “Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal” belum ada capaian pada triwulan II, nilai akan muncul pada akhir tahun 2023.
9. Sasaran strategis “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan”, dengan capaian sebesar 104% dengan kriteria **“MEMENUHI EKSPEKTASI”**
10. Sasaran strategis “Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel”, dengan capaian sebesar 96,80 % dengan kriteria **“BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI”**

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Jakarta didukung APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp48.085.117.000,- dengan realisasi anggaran yang dibelanjakan pada Triwulan II tahun 2023 sebesar Rp 22.077.012.946 dengan persen realisasi anggaran sebesar 43,52%.

HIGHLIGHT KINERJA

Dalam upaya perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dan untuk meningkatkan hasil pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan kegiatan **terobosan** di Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut:

1. **Tampung Aspirasi Stakeholder dan Masyarakat, BBPOM di Jakarta Adakan Forum Konsultasi Publik**



Dalam rangka koordinasi dan menjangkau aspirasi pengguna layanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas pelayanan publik, BBPOM di Jakarta melaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 pada Selasa (04/04/2023) secara hybrid bertempat di Kantor BBPOM di Jakarta dan daring melalui Zoom Meeting yang dihadiri

oleh lintas sektor meliputi Ombudsman DKI Jakarta, Dinas dan Suku Dinas Kesehatan, Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP), Kepolisian Daerah Metro Jaya, PD IAI, Politeknik Kesehatan Kemenkes, Asosiasi Pelaku Usaha meliputi Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi, Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi), Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia, Organisasi Masyarakat IWAPI, pelaku usaha serta media massa dari beritajakarta. BBPOM di Jakarta senantiasa berkomitmen melaksanakan pelayanan publik prima, salah satunya melalui sinergi program pendampingan/fasilitasi UMKM dengan Dinas PPKUKM sehingga memudahkan pelaku usaha dalam melakukan pengurusan perizinan Obat dan Makanan. Pada forum konsultasi publik ini disampaikan 7 (tujuh) jenis layanan publik yang disusun dalam Surat Keputusan Pelayanan Publik dan diimplementasikan pada tahun 2023 ini. Kemudian dilakukan sesi pemberian masukan dan penandatanganan berita acara dari berbagai unsur meliputi pemerintah daerah, stakeholder pelayanan publik, akademisi, pengguna layanan publik, organisasi masyarakat/asosiasi serta media massa, yaitu Dinas PMPTSP DKI Jakarta, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Polda Metro Jaya, Politeknik Kesehatan Jakarta II, pengusaha UMKM Dapur by Unie, DPD IWAPI, GP Farmasi, dan beritajakarta.

2. **Sinergi BBPOM di Jakarta Pastikan Pangan Aman di Retail Modern Jakarta Pusat**

BBPOM di Jakarta bersama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan pengawasan pangan di retail modern Jakarta Pusat. Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Bidang Pengawasan Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Juanda P. Jaya beserta jajarannya melakukan pengawasan barang beredar bersinergi dengan BBPOM di Jakarta yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Kelompok Substansi Pemeriksaan, Rini Asri. Pengawasan meliputi pengecekan izin edar dan Tanggal Kadaluausa.

Pada kegiatan pengawasan terpadu tersebut, BBPOM di Jakarta juga melakukan sampling dan pengujian terhadap pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya menggunakan Rapid Test Kit Formalin, Boraks, Rhodamin B, dan Methanyl Yellow. Pengujian dimaksudkan guna melindungi masyarakat dari pangan yang berpotensi memiliki bahaya bagi kesehatan. Hasil pengujian pada sampel makanan menunjukkan tidak adanya produk pangan yang mengandung bahan berbahaya dimaksud. Masyarakat terus dihibau untuk menjadi konsumen cerdas sebelum membeli produk Obat dan Makanan selalu menerapkan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa). Sehingga masyarakat dapat memperoleh produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu serta terhindar dari produk yang beresiko terhadap kesehatan.

3. Waspada Kolaborasi dengan Lintas Sektor, BBPOM di Jakarta mengawal Pengawasan Pangan Terpadu di Jakarta Selatan



BBPOM di Jakarta berkolaborasi dengan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan, BBPOM di Jakarta melakukan Pengawasan Pangan Terpadu di Lotte Mart, Mall Kuningan City.

Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, Ali Muthardho turut mengawal pelaksanaan

kegiatan ini guna memastikan keamanan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Hari Raya Idul Fitri 2023/1444 H. Melalui operasional mobil laboratorium keliling, Balai Besar POM di Jakarta melakukan sampling dan pengujian terhadap pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya menggunakan Rapid Test Kit terhadap 4 (empat) bahan berbahaya ; Formalin, boraks, rhodamin B, dan Methanyl yellow. Berdasarkan hasil pengujian, semua pangan memenuhi syarat, tidak mengandung bahan berbahaya.

Dengan menyajikan contoh pangan mengandung bahan berbahaya dan membagikan Leaflet 4 (empat) Bahan Berbahaya dalam makanan, Nomor Izin Edar Obat dan Makanan, Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa), Baca Label, dan Lima Kunci Keamanan Pangan, Balai Besar Pom di Jakarta melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada para pengunjung.

4. Kembali ! Gelar Pengawasan Terpadu, Pastikan Pangan Aman di Retail Modern Jakarta Timur



BBPOM di Jakarta bersama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah (Dinas PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta kembali gelar kegiatan pengawasan pangan di retail modern Jakarta Timur. Memimpin langsung kegiatan, Kepala Balai Besar POM di Jakarta, Susan Gracia Arpan dan Kepala Bidang Pengawasan Dinas

PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Juanda P. Jaya. Pengawasan meliputi pengecekan izin edar, tanggal kadaluarsa dan pangan mengandung bahan berbahaya

Pada Kegiatan pengawasan terpadu tersebut, BBPOM di Jakarta melakukan sampling dan pengujian terhadap pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya menggunakan rapid test kit Formalin, Boraks, Rhodamin B, Methanyl Yellow. Pengujian dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari pangan yang dapat membahayakan kesehatan. Dari hasil pengujian menunjukkan tidak terdapat produk yang mengandung bahan berbahaya.

Selain pengujian sampel, BBPOM di Jakarta juga melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara langsung kepada masyarakat. Penyebaran leaflet oleh petugas antara lain 4 bahan berbahaya dalam pangan, nomor izin edar Obat dan Makanan, BPOM Mobile, Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar dan Kadaluarsa), Baca Label, dan Lima Kunci Keamanan Pangan. Serta ditampilkan contoh pangan yang mengandung bahan berbahaya dan bahan berbahaya pada pangan. Diharapkan masyarakat dapat menjadi konsumen cerdas dalam memilih atau mengonsumsi pangan yang aman.

5. Yes or No Penerapan E-SPPD pada Balai Besar POM di Jakarta



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta menghadirkan narasumber kegiatan forum diskusi penerapan E-SPPD adalah Bapak Kamaludin Nur dan Masbur Aditama Pradana selaku Pranata Komputer Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

yang akan menyampaikan materi aplikasi E-SPPD yaitu Simondi (Sistem Monitoring Perjalanan Dinas). Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta membutuhkan sistem SPPD elektronik ini dikarenakan banyaknya pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas sehingga output yang diharapkan adalah percepatan pertanggungjawaban keuangan.

Narasumber memberikan materi berupa simulasi penerapan E-SPPD di Kementerian PUPR yang mana Plt. Kepala Balai Besar POM di Jakarta dapat mengadopsi sistem ini, namun aplikasi E-SPPD perlu dikomunikasikan juga ke Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) Badan POM, hal ini bertujuan mempermudah pelaporan dan pemeriksaan anggaran perjalanan dinas, sehingga lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Diadakannya forum diskusi ini bertujuan juga untuk menyerap ilmu dan bisa mengadopsi sistem yang telah diterapkan pada Kementerian PUPR ke Badan POM.

Aplikasi E-SPPD diharapkan dapat meningkatkan percepatan pelayanan administrasi perjalanan dinas berbasis elektronik dengan adanya Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah penyampaian laporan perjalanan dinas sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik khususnya di Balai Besar POM di Jakarta

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Highlight Kinerja	iii
Daftar Isi	vi
Bab I Latar Belakang	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	2
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Isu Strategis	3
Bab II Perencanaan Kinerja	5
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis	5
2.2 Rencana Kerja Tahun 2023	9
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	11
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
2.5 Metode Pengukuran	18
Bab III Akuntabilitas Kinerja	19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	19
3.2 Realisasi Anggaran	100
Bab 4 Penutup	102
4.1 Kesimpulan	102
4.2 Saran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proactive control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *sampling* dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai UPT Badan POM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yaitu:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: *sampling* dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi DKI Jakarta;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Tugas

Melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
- pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
- pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
- pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta

1.4. Isu Strategis

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis Balai Besar POM di Jakarta dalam mendukung pembangunan pemerintah atau kinerja instansi atau satuan kerja lainnya dan mendukung pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta

a. Lingkungan Internal

1. Sumber Daya Manusia

Balai Besar POM di Jakarta per 30 Desember 2022 memiliki 125 PNS dan 18 pramubakti teknis. Jumlah ini masih belum memenuhi standar sesuai Analisis Beban Kerja dan telah dibuatkan perencanaan pemenuhannya sampai dengan tahun 2024.

2. Sumber Daya Lainnya

Kantor Balai Besar POM di No. hanya memiliki 1 (satu) bangunan gedung dengan total luas tanah 2.750,00 m² dan luas bangunan 2.404,00 m², didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di No. memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu, Balai Besar POM di Jakarta dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015 dan telah tersertifikasi untuk seluruh bisnis prosesnya.

b. Lingkungan Eksternal

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi DKI Jakarta terletak pada 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Lintang Selatan. Wilayah Provinsi DKI Jakarta seluas 662,33 km². Cakupan wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 6 Kabupaten/Kota terdiri dari 1 Kabupaten dan 5 Kota dengan jumlah penduduk 10,6 juta jiwa.



Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta

2. Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka segenap jajaran Badan POM termasuk Balai Besar POM di Jakarta bercita-cita mewujudkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu: "Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan Misi Balai Besar POM di Jakarta mengacu pada Misi BPOM sebagai berikut:

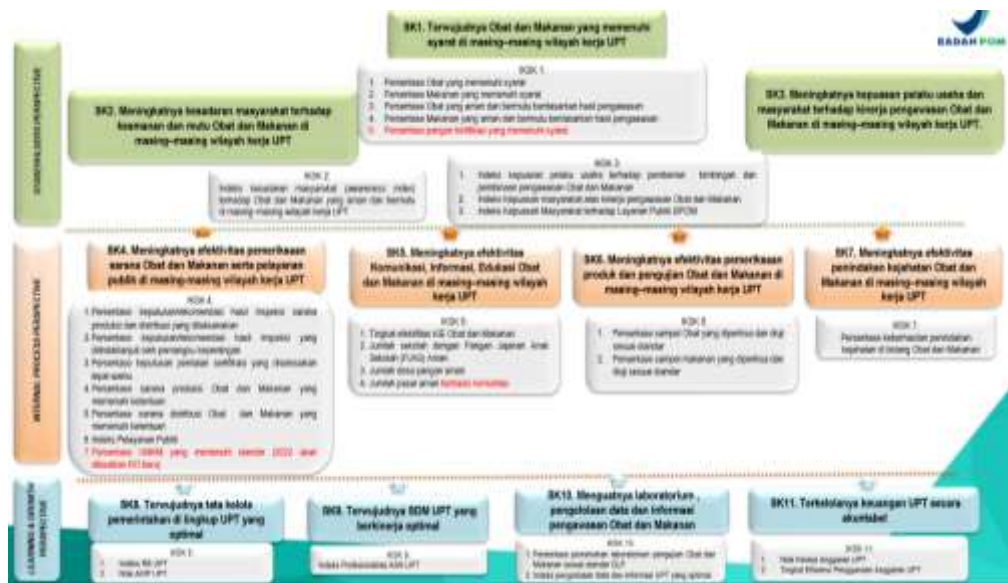
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM Balai Besar POM di Jakarta dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam periode waktu 2020-2024 dapat dilihat pada peta strategi level II Balai Besar POM di Jakarta, sebagai berikut:



Gambar 3. Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta ini disusun berdasarkan sasaran strategis pada peta strategi level 0 Kepala BPOM yang menggambarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Jakarta akan dapat mencapai sasaran strategis di Wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis BPOM secara Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021 menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja. Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai Besar POM di Jakarta tergambar dalam tabel berikut:

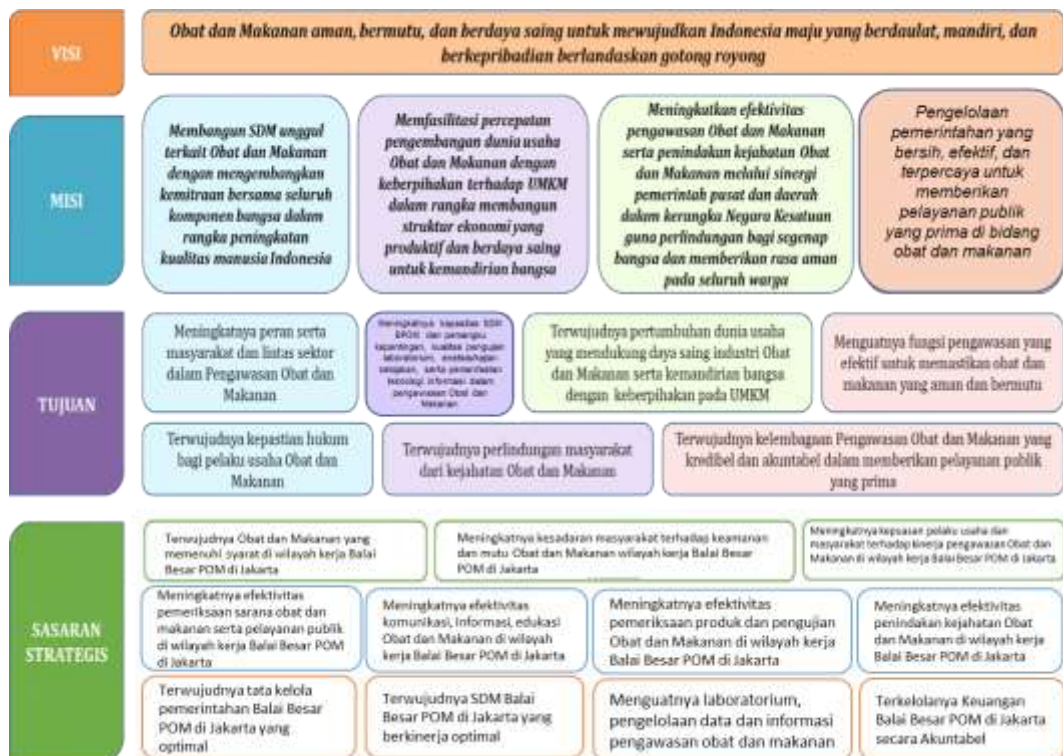
Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024

Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholder						
Terwujudnya Obat dan Makanan yang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86	80	81	82	83

Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	95	95.5	96	96.5
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	80	81	82	83
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	81	83	84	86
	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	-	88	89	90	90
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75	85	87	89	91
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	86.6	87.7	88.8	89.9
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	74.98	76.65	78.33	80.01
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5	90	91	92	93
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	90	91	93
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,5	75	79	82	85
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	85	87	89	91
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	60	63	65	70
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	73	75	78	80
	Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	3,51	4.20	4,3	4,55	4,65
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	77	79	81
Internal Process						
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	93	94.4	95.8	97.3
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	65	90	115
	Jumlah desa pangan aman	7	14	21	28	36
	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	1	2	3	4	6
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	100	100	100	100
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	100	100	100	100

Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta						
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32	54	58	61	65
Learning and Growth						
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88	82.4	83.4	84.4	85.4
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81	79.1	80	81	82
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75	84.25	84.5	84.75	85
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	77	82	87	92
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	1,51	2	2,25	2,5	3
Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93	91.9	92.5	93.7	94.9

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, maka kedudukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis (versi renja) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (periode 2020-2024) diharapkan Balai Besar POM di Jakarta mampu mencapai sasaran strategis secara efektif dan efisien sehingga memberikan kontribusi positif dalam dimensi pembangunan manusia seiring dengan proses revolusi mental sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan penjabaran masing-masing Sasaran Strategis.

2.2. Rencana Kerja Tahun 2023

Perencanaan kinerja Balai Besar POM di Jakarta terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam SK Kepala Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2020.

Tabel 2. Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jakarta TA 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	82
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	89
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88.8
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78.33
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	92
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
		Indeks Pelayanan Publik	4.40
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.8
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	90
		Jumlah desa pangan aman	28
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	61
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	84.4
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	84.75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2.5
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93.7

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2021 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai Besar POM di Jakarta, sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	82,00
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96,00
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,00
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,00
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	89,00
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88,80
	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78,33
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,00
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00
	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82,00

Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89,00
	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,00
	15	Indeks Pelayanan Publik	4,55
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,80
	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	88,00
	19	Jumlah desa pangan aman	28,00
	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4,00
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	61,00
Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal	24	Indeks RB BBPOM di Jakarta	84,40
	25	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	81,00
Terwujudnya SDM BBPOM di Jakarta yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jakarta	84,75
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87,00
	28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta yang optimal	2,50
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	93,70

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2023 pada sasaran program berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan berdasarkan tren data capaian periode Renstra tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Jakarta sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima

amanah (Kepala Balai Besar POM di Jakarta) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi dan digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan periode berikutnya.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023	Target Bulanan (kumulatif)													
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES		
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	89,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,00	

Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023	Target Bulanan (kumulatif)											
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,80
	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,33
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,00
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89,00	89	89	89	89	89	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
	15	Indeks Pelayanan Publik	4,55	-	-	-	-	-	-	-	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55

Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023	Target Bulanan (kumulatif)											
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	3,30	10,00	24,20	37,50	37,50	38,30	38,30	38,30	39,20	65,80	95,80	79,00
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,80	95,80	95,80	95,80	95,80	95,80	95,80	95,80	95,80	95,80	95,80	95,80	95,80
	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	88,00	20,00	20,00	30,00	30,00	55,00	55,00	55,00	70,00	70,00	90,00	90,00	88,00
	19	Jumlah desa pangan aman	28,00	20,00	20,00	20,00	25,00	40,00	45,00	70,00	75,00	80,00	85,00	95,00	28,00
	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4,00	25,00	25,00	25,00	40,00	60,00	70,00	85,00	85,00	85,00	100,00	100,00	4,00
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	5,00	5,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	5,00	5,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	61,00	5,00	5,00	10,00	15,00	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	61,00
Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal	24	Indeks RB BBPOM di Jakarta	84,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,40
	25	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	81,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,00

Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023	Target Bulanan (kumulatif)											
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
Terwujudnya SDM BBPOM di Jakarta yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jakarta	84,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,75
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,00
	28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta yang optimal	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	93,70	75	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	93,70

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja adalah tim monitoring dan evaluasi yang terkait dengan indikator tersebut.

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Kriteria pencapaian kinerja

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.3. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Perhitungan/ pengukuran kinerja perlu dilakukan

Tabel 6. Pencapaian Sasaran Strategis triwulan II Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA	KESIMPULAN
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	100,37	Memenuhi Ekspetasi	Efektif
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	-	-	-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	-	-	-
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	117,47	Memenuhi Ekspetasi	Efektif
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	101,79	Memenuhi Ekspetasi	Efektif
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	113,39	Memenuhi Ekspetasi	Efektif
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	150,03	Tidak Dapat Disimpulkan	
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	-	-	-
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	-	-	-
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	104,00	Memenuhi Ekspetasi	Efektif
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	96,80	Belum Memenuhi Ekspetasi	Kurang Efektif

Pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta telah ditetapkan 11 sasaran strategis dan 29 indikator kinerja dengan pencapaian sebagai berikut

Tabel 7. Hasil Pencapaian indikator kinerja

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target TW II	Volume			Anggaran		
				Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	$g=f/e*100$		h	i	$j=i/h*100$
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	82	90,94	110,90	Memenuhi Ekspektasi	508.813.550	103.399.059	20,32
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96	94,8	98,75	Belum Memenuhi Ekspektasi	284.565.050	44.087.812	15,49
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	81,43	99,30	Belum Memenuhi Ekspektasi	508.813.550	103.399.059	20,32
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	93,33	111,11	Memenuhi Ekspektasi	284.565.050	44.087.812	15,49
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	73,6	81,78	Belum Memenuhi Ekspektasi	50.898.400	6.465.900	12,70
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	-	-	-	-	372.657.300	129.899.285	34,86
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	37.455.000	10.523.600	28,10
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	343.766.850	101.549.166	29,54

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target TW II	Volume			Anggaran		
				Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	$g=f/e*100$			h	i
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-	176.000.000	34.724.000,00	19,73
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	89,23	98,05	Belum Memenuhi Ekspektasi	374.182.000	96.348.402	25,75
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82	90,19	109,99	Memenuhi Ekspektasi	374.182.000	96.348.402	25,75
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89	100	112,36	Memenuhi Ekspektasi	259.500.000	99.223.600	38,24
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	72,41	111,40	Memenuhi Ekspektasi	149.257.000	50.303.372	33,70
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	83,28	106,77	Memenuhi Ekspektasi	599.107.000	142.393.432	23,77
		Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	Nilai realisasi dihitung mulai B07	434.766.850	121.549.166	27,96
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	38,3	63,67	166,24	Tidak Dapat Disimpulkan	76.029.000	11.129.253,00	14,64
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,8	95,83	100,03	Memenuhi Ekspektasi	4.697.413.000	2.849.024.447	60,65

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target TW II	Volume			Anggaran		
				Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	$g=f/e*100$			h	i
	Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	55	55	100,00	Memenuhi Ekspektasi	703.121.000	106.922.008	15,21
		Jumlah desa pangan aman	45	45	100,00	Memenuhi Ekspektasi	159.366.000	39.510.000	24,79
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	70	75	107,14	Memenuhi Ekspektasi	106.629.000	35.802.000	33,58
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40	44,29	110,73	Memenuhi Ekspektasi	436.125.000	88.627.765	20,32
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40	46,42	116,05	Memenuhi Ekspektasi	265.726.500	40.560.653	15,26
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	30	45,01	150,03	Tidak Dapat Disimpulkan	1.007.812.000	318.945.823	31,65
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal	Indeks RB BBPOM di Jakarta	-	-	-	-	318.155.000	111.682.770	35,10
		Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	-	-	-	-	54.019.000	8.519.000	15,77

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target TW II	Volume			Anggaran		
				Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	$g=f/e*100$			h	i
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jakarta	-	-	-	-	28.600.000	4.452.000	15,57
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-	5.877.061.000	2.418.256.010	41,15
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta yang optimal	2,5	2,6	104,00	Memenuhi Ekspektasi	73.925.000	9.602.510	12,99
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	80	77,44	96,80	Belum Memenuhi Ekspektasi	23.538.495.000	13.039.676.289	55,40

Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja, terdapat 13 (tiga belas) indikator mencapai target dengan kriteria “**MEMENUHI Ekspektasi**”, 5 (lima) indikator mencapai target dengan kategori “**TIDAK MEMENUHI Ekspektasi**”, 2 (dua) indikator mempunyai capaian lebih dari 120% dengan kategori “**TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**” dan 9 (Sembilan) indikator belum dapat dihitung capaiannya karena merupakan indikator yang hanya bisa dihitung pada akhir tahun 2023.

Kriteria baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi DKI Jakarta tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan II*

Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	82	90,94	110,90	Memenuhi ekspektasi

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.

No	Kriteria
1	Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2	Produk kadaluarsa
3	Produk rusak
4	Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5	Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat

TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (poin 4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

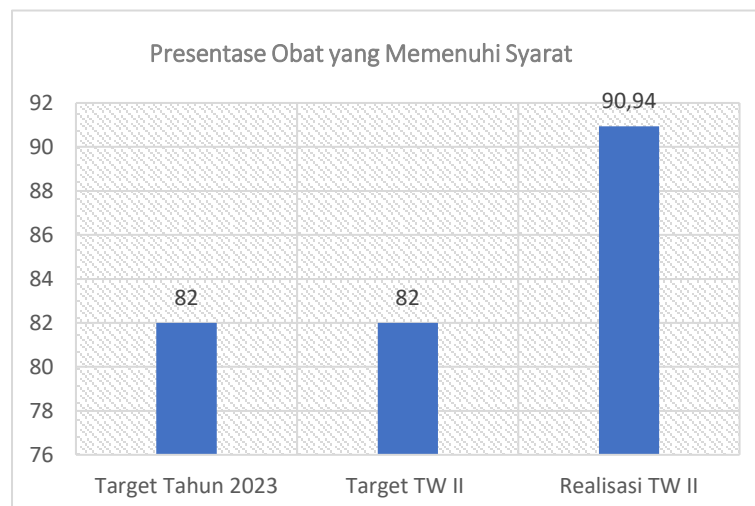
- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka.

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian di laboratorium.
- Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
- Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja Loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan, Loka yang tidak melakukan pengujian dapat menggunakan hasil uji dari Balai Penguji untuk poin 5.

b. Perbandingan realisasi dan capaian TW II target tahun 2023

Realisasi indikator “Persentase Obat yang memenuhi syarat” pada TW II adalah sebesar 90,94% dengan capaian sebesar yaitu 110,90% termasuk kriteria “Memenuhi ekspektasi”. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 , maka disimpulkan termasuk kategori “efektif”.



Gambar 5. Perbandingan Realisasi TW II dibandingkan dengan Target TW II dan Target Tahun 2023

c. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Target indikator kinerja TW II tahun 2023 sudah memenuhi target yang ditetapkan, hal ini sudah baik, namun perlu terus ditingkatkan untuk di triwulan selanjutnya. Dari 790 sampel acak yang masuk laboratorium, sudah selesai diuji sebanyak 618 sampel (78.23%), namun yang memenuhi syarat sebesar 562 sampel (90,94%) dari sampel selesai uji.

d. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja pencapaian pernyataan kinerja**

Intervensi Seluruh intervensi yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta sudah cukup efektif untuk memenuhi target indikator kinerja presentase obat yang memenuhi syarat di triwulan II ini. Harapannya hal ini dapat terus ditingkatkan di triwulan mendatang.

e. **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pembinaan kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang Kosmetik dan Obat Tradisional untuk selalu memenuhi ketentuan		Progress pembinaan kepada pelaku usaha	Akhir tahun 2023

2. **Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat**

a. **Matriks Perbandingan target dan realisasi triwulan II**

Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96	94,80	98,75	Belum Memenuhi Ekspektasi

Yang dimaksud dengan Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- 2) Produk kadaluarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

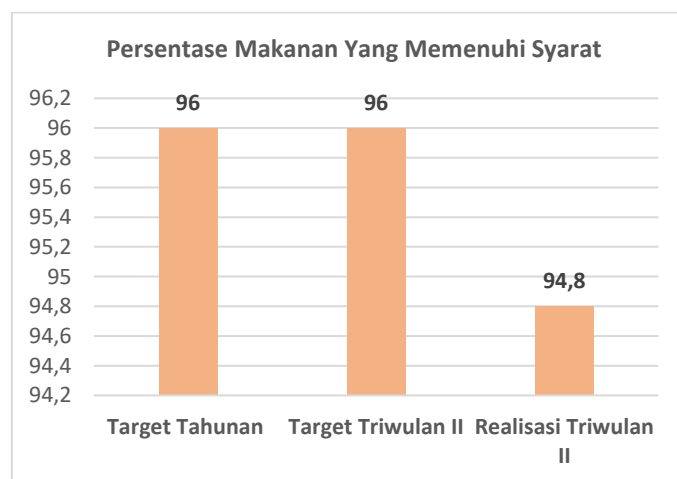
Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS, kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

b. Perbandingan realisasi dan capaian TW II dengan target tahun 2023

Realisasi indikator “Persentase makanan yang memenuhi syarat” pada TW II adalah sebesar 94,80% dengan capaian sebesar yaitu 98,75% termasuk kriteria “Belum memenuhi ekspektasi”. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 , maka disimpulkan termasuk kategori “kurang efektif” sehingga diperlukan evaluasi dan monitoring untuk meningkatkan capaian pada triwulan selanjutnya



Gambar 6. Perbandingan Realisasi TW II dibandingkan dengan Target TW II dan Target Tahun 2023

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Belum tercapainya target indikator kinerja TW II dipengaruhi oleh banyaknya sampel acak yang tidak memenuhi persyaratan uji laboratorium dan sampel yang belum selesai proses uji, sehingga menyebabkan persentase makanan yang memenuhi syarat tidak mencapai target. Dari 186 sampel acak yang masuk laboratorium, sebanyak 169 sampel telah selesai uji di laboratorium (90,86 %). Sebanyak 165 sampel memenuhi syarat dan terdapat 4 sampel tidak memenuhi syarat uji mikrobiologi. Adapun sampel yang tidak memenuhi syarat tersebut adalah 1 sampel tepung bumbu dan 3 sampel makanan ringan non ekstrudat (TMS Ak. Enterobacteriaceae).

Adanya kegiatan Food Security dalam rangka Pengawasan Kegiatan 41st Senior Officials Meeting on Energy ASEAN pada tanggal 19 – 23 Juni 2023 ikut mempengaruhi penyelesaian timeline pengujian sampel.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja pernyataan kinerja.

Kegiatan pengawasan, penyidikan , KIE serta peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia sebagaimana yang dijelaskan pada butir b di atas, jika dilaksanakan secara maksimal dan terus menerus akan dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Namun jika pelaksanaannya kurang intensif, dapat menyebabkan tidak tercapainya target kinerja.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan koordinasi dengan tim Pemeriksaan dan Infokom terkait dengan temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta agar dapat dilakukan pembimbingan dan diawasi secara rutin dan terus menerus ke produsen sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.		Melakukan koordinasi dengan Poksi Pemeriksaan dan Infokom	Akhir tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
2	Melakukan evaluasi pengawasan melalui sampling dan pengujian secara berkala terhadap produsen-produsen yang produk pangannya TMS pengujian maupun TMK.		Melakukan evaluasi pengawasan melalui sampling dan pengujian secara berkala terhadap produsen-produsen yang produk pangannya TMS pengujian maupun TMK.	Akhir tahun 2023

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. *Matriks Perbandingan target dan realisasi triwulan II dengan target TW II*

Tabel 10. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	81,43	99,30	Belum Memenuhi Ekspetasi

Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan merupakan obat yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive tahun 2020. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psicotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disampling secara targeted/purposive.

Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan rumus sebagai berikut:

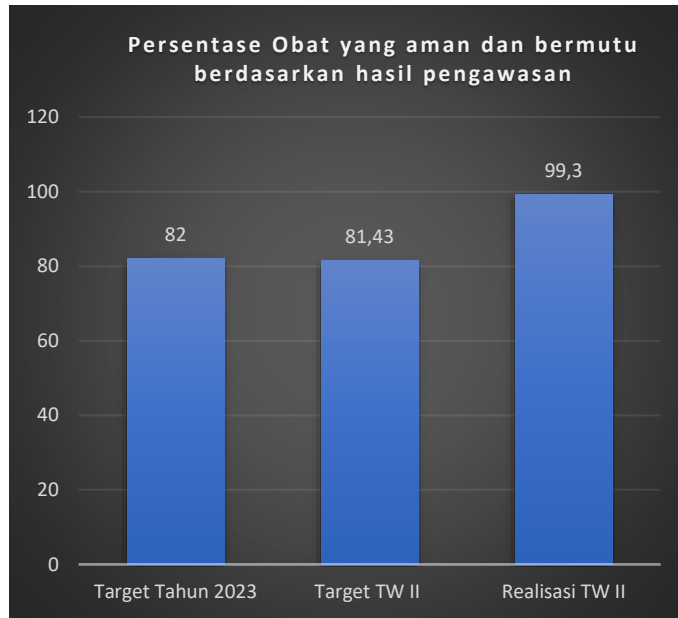
$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan target tahun 2023

Pada indikator “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” pada TW IV ini realisasi indikator adalah 75,0% dengan capaian TW IV adalah 92,59% termasuk kriteria “Belum Memenuhi Ekspetasi”. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 dengan capaian, termasuk kategori “Kurang Efektif” sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi realisasi capaian pada tahun mendatang.



Gambar 7. Perbandingan Realisasi TW II dibandingkan dengan Target TW II dan Target Tahun 2023

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Rendahnya capaian indikator kinerja TW II tahun 2023 tersebut dipengaruhi oleh banyaknya sampel kosmetik hasil sampling targeted yang tidak memenuhi ketentuan penandaan, sehingga menyebabkan persentase obat yang memenuhi syarat sangat rendah. Selain itu terdapat beberapa sampel obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang tidak memenuhi syarat uji, produksi dari produsen dengan Riwayat TMS. Dari 608 sampel targeted yang masuk laboratorium, seluruhnya sudah selesai diuji (100%) namun yang memenuhi syarat hanya sebanyak 465 sampel (75.0%).

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri farmasi untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB), sehingga produk obat yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri farmasi melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan CPOB maka industri farmasi wajib membuat Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin

obat yang diproduksi memenuhi standar, baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.

- Intervensi pengawasan juga dilakukan terhadap industri komoditi lainnya untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) atau Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) agar produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Seperti halnya industri farmasi, industri kosmetik dan obat tradisional pun harus membuat CAPA jika ada ketidaksesuaian terhadap pemenuhan CPKB / CPOTB dan juga dilakukan monitoring secara berkesinambungan untuk menjamin mutu produk yang diproduksi memenuhi standar (secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasinya).
- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk obat TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan produksi Industri di luar DKI Jakarta.
- Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas. Hal ini akan menimbulkan efek jera pada pelaku usaha, sehingga diharapkan dapat mengurangi temuan pelanggaran.
- Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Obat kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta agar mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk memilih produk yang aman bagi Kesehatan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Sudah dilaksanakan	penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	TW III Tahun 2023
2	Pengembangan kompetensi personil baik lama maupun baru dilakukan secara berkala dengan melakukan bimbingan teknis secara internal maupun eksternal.	Sudah dilaksanakan	Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN	TW III Tahun 2023
3	Pembinaan kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang Kosmetik dan Obat Tradisional untuk selalu memenuhi ketentuan	Sudah dilaksanakan	Dilakukan pendampingan pre market terhadap UMKM produksi Kosmetik	TW III Tahun 2023

4. **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta**

a. **Matriks Perbandingan target dan realisasi triwulan II dengan target TW II**

Tabel 11. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	93,33	111,11	Memenuhi Ekspetasi

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted / purposive di tahun berjalan. **Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi.**

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

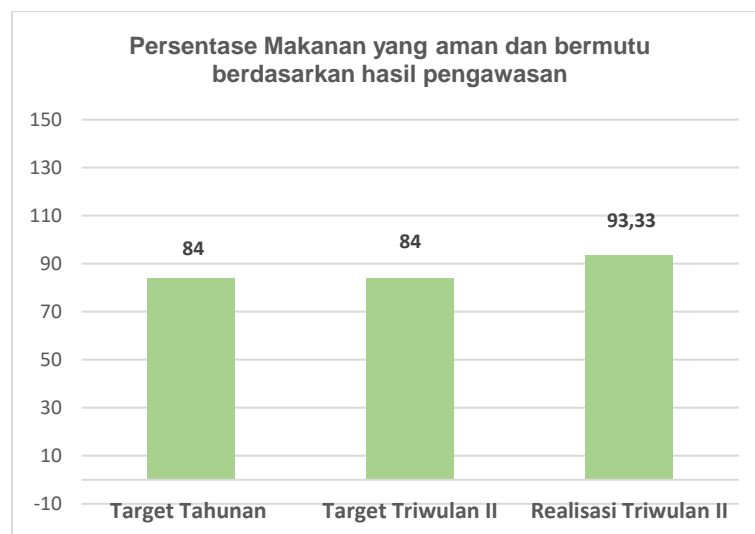
- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian di laboratorium.
- Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja Loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, Loka yang tidak melakukan pengujian dapat menggunakan hasil dari Balai Penguji untuk memperoleh poin d.5.
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

b. Perbandingan realisasi dan capaian TW II tahun 2023

Realisasi indikator “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” pada TW II adalah 93,33% dengan capaian sebesar yaitu 111,11% termasuk kriteria capaian “Memenuhi Ekspektasi”. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023, termasuk kategori “Efektif” sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi realisasi untuk mempertahankan capaian pada triwulan selanjutnya.



Gambar 8. Perbandingan Realisasi TW II dibandingkan dengan Target TW II dan Target Tahun 2023

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Target indikator kinerja TW II tahun 2023 sudah memenuhi target yang ditetapkan, hal ini sudah baik, namun perlu terus ditingkatkan untuk di triwulan selanjutnya.

Dari 91 sampel targeted yang masuk laboratorium, sudah selesai diuji sebanyak 60 sampel (65,93 %), namun yang memenuhi syarat sebesar 55 sampel (91,66 %) dari sampel selesai uji. Sebanyak 3 sampel makanan ringan kacang tidak memenuhi syarat uji mikrobiologi (TMS Ak Enterobacteriaceae) dan 2 sampel madu tidak memenuhi syarat uji kimia (TMS HMF).

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Proses / Teknik sampling dan kondisi di sarana distribusi dan produsen juga mempengaruhi hasil pengujian di laboratorium. Pada Implementasi Regionalisasi di tahun 2022, Balai Besar POM di Jakarta laboratorium pangan dan bahan berbahaya ditunjuk sebagai Laboratorium Air dan Laboratorium spesifik Mikotoksin. Program perencanaan pengadaan alat, verifikasi metoda Analisa, bimbingan teknis internal dan eksternal, magang dan peningkatan ruang lingkup pengujian laboratorium yang terkait dengan pengujian Regionalisasi menjadi perhatian khusus. Peningkatan sarana dan prasarana tersebut meningkatkan cost/ biaya yang dikeluarkan dalam pembelian suku cadang, reagent, dan alat dalam jumlah banyak, sehingga memerlukan perencanaan yang lebih baik.

Segala Upaya yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta sudah cukup efektif untuk memenuhi target indikator kinerja presentase makanan yang memenuhi aman dan bermutu di triwulan II ini. Harapannya hal ini dapat terus ditingkatkan di triwulan selanjutnya.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Sudah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan	Penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Akhir tahun 2023
2	Pengembangan kompetensi personil baik lama maupun baru dilakukan secara berkala dengan melakukan bimbingan teknis secara internal maupun eksternal.	Sudah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan	Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN	Akhir tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
3	Intervensi pengawasan yang dilakukan terhadap sarana produksi makanan untuk meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB),	Sudah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan	Melakukan Pemdampingan dan pengawasan UMKM Pangan	Akhir tahun 2023
4	Melaksanakan bimbingan teknis Iklan dan Penandaan Makanan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan evaluasi Iklan dan Penandaan sehingga hasil pengawasan iklan dan penandaan dapat sesuai dengan pedoman.	Sudah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan	Melakukan Bimtek Pengawasan Iklan dan penandaan	Akhir tahun 2023

5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

a. *Matriks Perbandingan target dan realisasi triwulan II dengan target TW II*

Tabel 12. Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	73,6	81,78	Belum Memenuhi Ekspetasi

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.

Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujiannya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan.

Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan pengujian.

Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

Contoh: Parameter uji garam berdasarkan pedoman sampling adalah penetapan kadar KIO₃, NaCl, cemaran logam Pb dan kadar air. Meskipun yang MS hanya kadar KIO₃ sedangkan semua parameter lain TMS, maka kesimpulan akhir untuk perhitungan IKU ini tetap MS.

Persentase Pangan Fortifikasi berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Pangan Fortifikasi MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

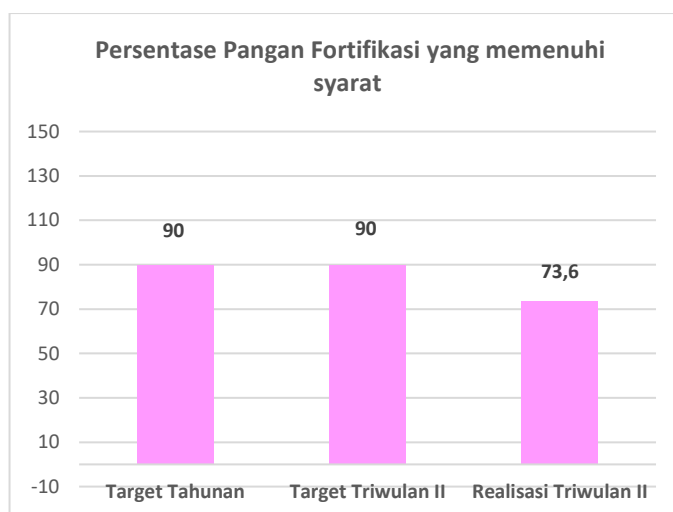
- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji

b. Perbandingan Perbandingan realisasi dan capaian TW II dengan target tahun 2023

Realisasi indikator “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” pada TW II adalah 73,60 % dengan capaian sebesar yaitu 81,78% termasuk kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023, maka termasuk kategori “kurang efektif” sehingga diperlukan evaluasi dan monitoring untuk meningkatkan capaian pada triwulan selanjutnya.



Gambar 9. Perbandingan Realisasi TW II dibandingkan dengan Target TW II dan Target Tahun 2023

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Jumlah jumlah sampel Pangan Fortifikasi yang masuk laboratorium sebanyak 52 sampel dan seluruh sampel telah selesai uji. Dari seluruh sampel yang telah selesai proses pengujian, sampel yang memenuhi syarat berjumlah 32 sampel (61,54%) dan 20 sampel (38,46%) tidak memenuhi syarat. Adapun sampel yang TMS tersebut seluruhnya adalah sampel garam.

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Peningkatan pengawasan pangan fortifikasi dengan peningkatan kompetensi dan metode uji ditingkatkan melalui kerjasama dengan pihak eksternal. Pada tahun 2022 mulai digunakan metode uji identifikasi Fe elektrolitik (FeO) sebagai skrining awal untuk mendeteksi Fe elektrolit yang tidak boleh terkandung dalam pangan fortifikasi tepung terigu. Peningkatan pengawasan pangan fortifikasi garam juga ditingkatkan dengan mulai menggunakan metode uji potensiometri yang lebih akurat dibandingkan metode titrimetric secara manual.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan kemampuan uji sampel fortifikasi	Sudah dilaksanakan	uji skrining awal Fe elektrolitik dan penggunaan potensiometri untuk penetapan kadar NaCl dalam garam.	Akhir tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
2	Peningkatan kompetensi laboratorium dan personil penguji	Sudah dilaksanakan, namun masih perlu dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan	Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN	Akhir tahun 2023
3.	Pembinaan kepada pelaku usaha pangan fortifikasi untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap Standar yang ditetapkan maupun ketentuan CPPB dan Penandaan	Sudah dilaksanakan, namun perlu lebih diintensifkan	Pembinaan kepada pelaku usaha pangan fortifikasi untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap Standar yang ditetapkan maupun ketentuan CPPB dan Penandaan	Akhir tahun 2023

Sasaran Strategis-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

6. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.

a. *Matriks perbandingan target triwulan II dengan realisasi TW II*

Tabel 13. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	89	-	-	-

Indeks kesadaran masyarakat merupakan ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) dalam memilih Obat dan Makanan. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Kesadaran yang diukur mencakup beberapa aspek yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku. Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Aspek pengetahuan mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi manfaat produk, ciri-ciri produk yang aman dan bermutu, produk yang tidak aman dan berbahaya, aturan pakai yang tepat serta logo golongan pada kemasan Obat. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran Obat atau Obat Tradisional palsu. Selanjutnya, dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengonsumsi obat dan makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan. Aspek sikap mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi sikap dalam menangani produk kedaluwarsa, tidak aman dan berbahaya serta palsu, dan cara melakukan penyimpanan produk. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan

masyarakat terhadap program Badan POM. Aspek perilaku mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi perilaku dalam menyimpan produk, membaca label/kemasan/dus/brosur, produk aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun.

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (PAKOM) dengan metode dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran. Kriteria yang digunakan adalah:

b. *Perbandingan realisasi TW II dengan target tahun 2023*

Hasil indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta triwulan II tahun 2023 belum dapat diperoleh nilai realisasi dan capaiannya dikarenakan indeks ini dapat diperoleh nilainya di akhir tahun 2023.

c. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan*

Beberapa faktor penyebab keberhasilan dari capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Secara demografi, wilayah DKI Jakarta yang merupakan wilayah urban memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi dibanding wilayah rural. Akses informasi mengenai Obat dan Makanan yang aman dan bermutu cenderung sangat mudah untuk diperoleh.
- 2) Adanya perkuatan sinergi dengan stakeholder terkait dalam pemberian penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan kepada masyarakat. Dalam hal ini BBPOM di Jakarta menggandeng Tokoh Masyarakat, Anggota Komisi IX DPR RI, Pemerintah Daerah (tingkat kota maupun provinsi), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), Badan Narkotika Nasional RI (BNN RI), akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan media melalui berbagai kegiatan KIE yang telah dilaksanakan.
- 3) Keragaman tema materi/ pesan penyuluhan dan KIE yang disampaikan ke masyarakat yang mencakup semua komoditi Obat dan Makanan, yaitu Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Pangan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

- 4) Peningkatan penggunaan media KIE dan penyebaran informasi mengenai pengawasan Obat dan Makanan oleh BPOM kepada masyarakat seperti pemanfaatan videotron yang ditampilkan di tempat-tempat umum wilayah DKI Jakarta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
- 5) Peningkatan konten/ materi informasi edukasi melalui media sosial yang mudah diakses oleh masyarakat dengan menggunakan tagline KataBPOM, Cek KLIK, dan BPOM Mobile.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 antara lain:

- 1) Terselenggaranya program pemberdayaan masyarakat melalui program Prioritas Nasional keamanan pangan di wilayah DKI Jakarta, yaitu program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) yang langsung memberikan pembinaan dan bimbingan teknis praktik keamanan pangan kepada komunitas kelurahan, pasar, dan sekolah.
- 2) Gencarnya promosi Obat dan Makanan aman dan bermutu dengan menggunakan tagline KataBPOM dan Cek KLIK pada materi dan infografis yang telah disusun.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Penyusunan program KIE terkait semua komoditi Obat dan Makanan	Telah disusun perencanaan pelaksanaan KIE Obat dan Makanan pada awal tahun 2023		TW IV tahun 2023

Sasaran Strategis-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

a. *Matriks perbandingan target dan realisasi TW II dengan realisasi TW II*

Tabel 14. Realisasi Indeks Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88,8	-	-	-

Kepuasan pelaku usaha adalah hasil pendapat dan penilaian pelaku usaha terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparaturnya penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Pelaku Usaha. Dasar pelaksanaan survei mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024. Tata cara survei mengacu pada Pedoman yang diterbitkan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM dengan judul Pedoman Survei Kepuasan Pelaku Usaha Obat dan Makanan terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) tahun 2021. Teknis pengumpulan data mengacu pada pedoman terbagi atas cara setelah kegiatan bimbingan langsung petugas memberikan link kuisioner yang dapat diakses oleh peserta melalui link <https://survei.prkom.pom.go.id>.

b. *Perbandingan realisasi TW II dengan target tahun 2023*

Hasil indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta triwulan II tahun 2023 belum dapat diperoleh nilai realisasi dan capaiannya dikarenakan indeks ini dapat diperoleh nilainya di akhir tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pelatihan, antara lain diselenggarakan desk CAPA, diskusi terkait perbaikan dokumen permohonan izin penerapan CPPOB, desk registrasi, baik secara luring maupun daring.

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Balai Besar POM di Jakarta secara intensif melakukan kegiatan Kerling Jakarta dan Sultan Betawi untuk memberikan informasi bagi pelaku usaha. Kerling Jakarta merupakan kegiatan jemput bola di mana tim Balai Besar POM di Jakarta mengunjungi lokasi-lokasi kantor Walikota di lima Wilayah Kota Administrasi, sedangkan untuk Sultan Betawi layanan diberikan di Mall Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi DKI Jakarta, semua ini dilakukan dalam rangka memudahkan pemberian layanan kepada pelaku usaha.

8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

a. Matriks Perbandingan target dan realisasi TW II dengan realisasi TW II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78,33	-	-	-

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun.

Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

- 1) Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.

- 2) Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan
- 3) Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.

b. Perbandingan realisasi dan capaian TW II target tahun 2023

Hasil indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta triwulan II tahun 2023 belum dapat diperoleh nilai realisasi dan capaiannya dikarenakan indeks ini dapat diperoleh nilainya di akhir tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Intensifikasi publikasi berbagai program pengawasan Obat dan Makanan melalui berbagai kegiatan, seperti pertemuan lintas sektor dalam rangka penguatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah DKI Jakarta, konsultasi publik, pemanfaatan subsite dan media sosial melalui berita aktual dan infografis yang menampilkan informasi mengenai kinerja pengawasan yang lebih menarik.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Penerapan inovasi portal Jakdigital sebagai sarana akses informasi publik dan hasil pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat melalui <https://bbpomjakarta.id>

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Diperlukan kegiatan publikasi yang lebih masif terkait berbagai program BBPOM di Jakarta yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan pesan utama untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan sehingga masyarakat mengetahui program pengawasan dan dapat merasakan dampak atas kinerja BBPOM di Jakarta serta pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan atas	Publikasi program dan capaian kinerja BBPOM di Jakarta baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media, baik media cetak/elektronik maupun media sosial.		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	kinerja pengawasan Obat dan Makanan.			

9. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan realisasi capaian TW II dengan target triwulan II

Tabel 16. Realisasi Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92	-	-	-

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Target dinyatakan dalam angka.

b. Perbandingan realisasi TW II dengan target tahun 2023

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM belum dapat dilihat realisasinya pada triwulan II ini, realisasi dan capaian belum dapat dihitung.

c. Tindak Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Peningkatan pemberian layanan publik BBPOM di Jakarta melalui berbagai kanal baik secara tatap muka maupun secara online dengan melalui Whatsapp, media sosial (Instagram, Facebook, dan Twitter) dan memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Pelaksanaan inovasi pelayanan publik Kerling Jakarta (Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling) dan Sultan Betawi (Loket konsultasi dan layanan informasi sertifikasi di Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta) untuk memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh layanan sertifikasi dan layanan informasi obat dan makanan yang lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat mengingat adanya masukan dari hasil SKM periode sebelumnya bahwa lokasi kantor BBPOM di Jakarta sulit untuk dijangkau

Sasaran Strategis-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi TW II Tahun 2023

Tabel 17. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	89,23	98,05	Belum Memenuhi Ekspetasi

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.

Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain, Pelaku usaha dan Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan} = (A+B+C+D)/4$$

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan} = (217,91+100+55,84+100)/4$$

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan} = 118,44$$

Keterangan:

Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara perhitungan = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT x 100%

$$A = 298/298 \times 100\%$$

$$A = 100\%$$

Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

$$B = 92/92 \times 100\%$$

$$B = 100\%$$

Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

$$C = 37/65 \times 100\%$$

$$C = 56,92\%$$

Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

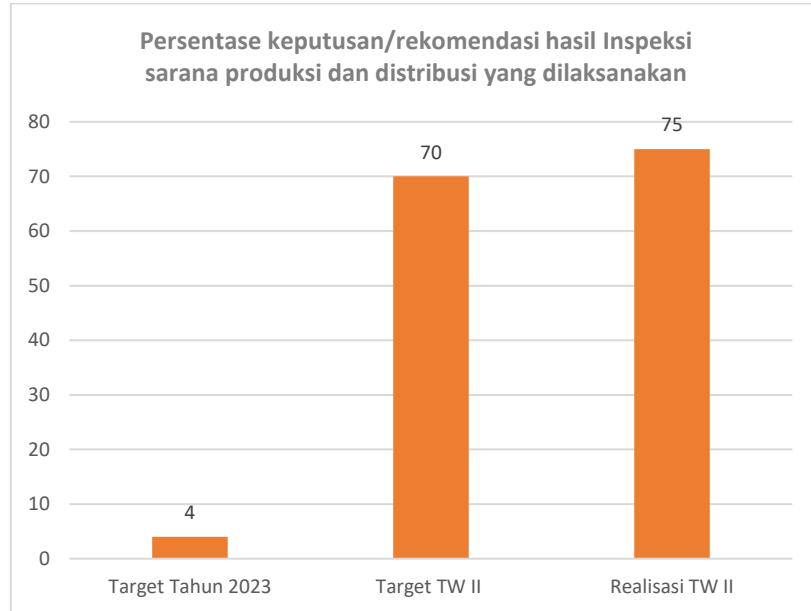
Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi dari lintas sector terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

$$A = 37/37 \times 100\%$$

$$A = 100\%$$

b. Perbandingan Capaian Target dan Realisasi TW II dengan target tahun 2023

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di tahun 2023 Triwulan II belum memenuhi target yang ditetapkan, realisasi 89,23 dari target 91 sehingga capaian 98,05% terhadap target sehingga masuk dalam kriteria "BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI"



Gambar 10. Perbandingan Realisasi TW II dibandingkan dengan Target TW II dan Target Tahun 2023 pada IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Target belum tercapai pada triwulan 2 tahun 2023 karena rendahnya nilai Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/ UPT lain yaitu 56,92% sedangkan faktor rekomendasi lain telah mencapai nilai maksimal yaitu 100% untuk Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT dan Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.

Hal-hal yang telah diupayakan oleh BBPOM Jakarta antara lain:

- Pengiriman surat tindak lanjut oleh BBPOM di Jakarta secara tepat waktu terhadap pelaku usaha yang melanggar / tidak sesuai ketentuan, sudah sesuai timeline yang ditetapkan.
- BBPOM di Jakarta segera menindaklanjuti rekomendasi dari Pusat, sesama UPT, maupun pemangku kepentingan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Balai Besar POM di Jakarta mempunyai Sistem si DOEL (Sistem (Spreadsheet) Data Online Pemantauan Sarana dan Tindak Lanjut). Pada system ini berupa form monitoring hasil pengawasan rutin, sehingga dapat dilakukan kontrol terhadap tindak lanjut yang telah/belum dilaksanakan oleh BBPOM di Jakarta

Adanya kontrol surat masuk dari Pusat, UPT lain, maupun lintas sektor sehingga dapat dikendalikan pelaksanaannya

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan koordinasi dengan unit pusat BPOM dan UPT lain		Rapat membahas tindak lanjut surat yang ditujukan kepada Unit Pusat BPOM dan UPT Lain	Des 2023

11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi TW II Tahun 2023

Tabel 18. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82	90,19	109,99	Memenuhi Ekspetasi

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

1) pelaku usaha;

2) lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$
$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepalalintas sektor}} \times 100\%$$

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(66,10\%+114,29\%)/2$

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = 90,19%

Keterangan:

Persentase keputusan hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha

Cara perhitungan:

A = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha x 100%

$$A = 195/295 \times 100\%$$

$$A = 66,10\%$$

Persentase keputusan hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Cara perhitungan:

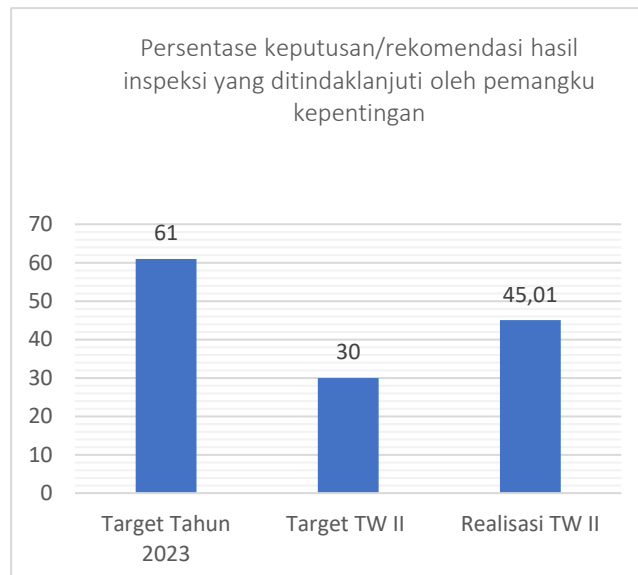
B = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor/ Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor x 100%

$$B = 8/7 \times 100\%$$

$$B = 114,29\%$$

b. Perbandingan realisasi dan capaian TW II dengan target tahun 2023

Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 90,19% sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 82%. Untuk persentase capaian dari realisasi tersebut sebesar 109,99 % dengan kriteria "MEMENUHII EKSPEKTASI".



Gambar Perbandingan Realisasi TW II dibandingkan dengan Target TW II dan Target Tahun 2023

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sudah mencapai target.

Terdapat pelaku usaha yang belum menindaklanjuti keputusan/rekomendasi dari BBPOM Jakarta dengan mengirim bukti tindakan perbaikan dan pencegahan hasil pemeriksaan sesuai time line yang ditetapkan.

Tindak lanjut lintas sektor terkait pembinaan sarana hanya untuk PIRT oleh Suku Dinas Kesehatan terkait menggunakan aplikasi SMART-POM sebagai salah satu wadah komunikasi dengan BBPOM di Jakarta.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Target tercapai karena koordinasi lintas sektor sudah berjalan baik dan dioptimalkannya penggunaan Form CAPA yang diisi saat pemeriksaan sarana distribusi di wilayah DKI Jakarta.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Koordinasi dengan lintas sektor tindak lanjut hasil pengawasan IRTP	BBPOM Jakarta berkoordinasi dengan Sudinkes melalui forum FGD terkait tindak lanjut hasil pengawasan IRTP 9 Mei 2023		
2	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan		Memantau CAPA dari Pelaku Usaha dan memberikan sanksi yang lebih berat bila Matriks CAPA tidak dibuat sesuai timeline	Des 2023

12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi TW II dengan target TW II

Tabel 19. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89	100	112,36	Memenuhi Ekspetasi

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- (1) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- (2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- (3) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- (4) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan olahan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- (5) Surat rekomendasi bagi sarana importir kosmetik dan usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi kosmetik
- (6) Surat Rekomendasi obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT SK
- (7) Penerbitan persetujuan denah bangunan PBF

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

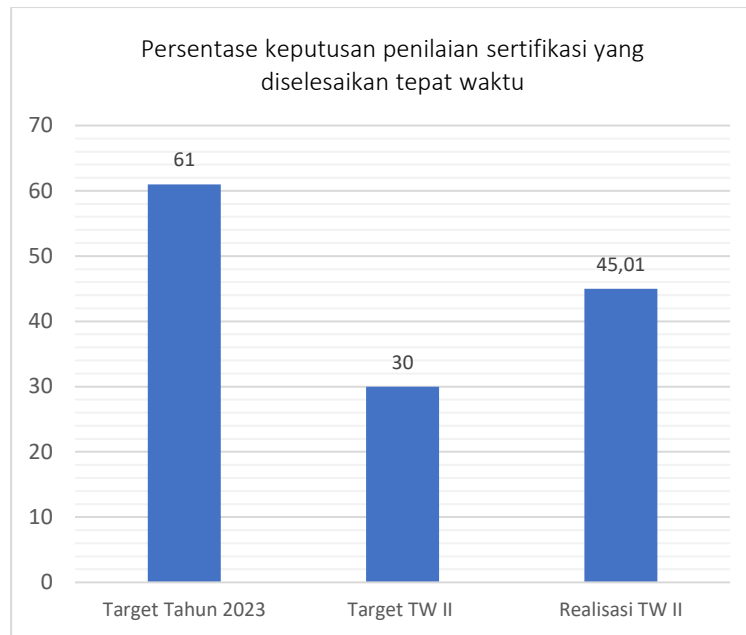
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya.

b. Perbandingan realisasi dan capaian TW II dengan target tahun 2023

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta pada triwulan II tahun 2023 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 89 %, jika dihitung terhadap target capaian sampai triwulan satu tahun 2023 sebesar 112,36 % .Total seluruh keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan sampai dengan triwulan II 2023 sebanyak 512 (lima ratus dua belas). Sebanyak 461 (empat ratus enam puluh satu) merupakan keputusan dari permohonan yang diterima pada tahun 2023 dan 51 (lima puluh satu) merupakan keputusan dari permohonan tahun sebelumnya. Dari 512 (lima ratus dua belas) sebanyak 511 (lima ratus sebelas) keputusan memenuhi timeline yang telah ditetapkan dan 1 (satu) keputusan sertifikasi tidak tepat waktu. Permohonan yang diterima sampai triwulan satu tahun 2023 sejumlah 472 (empat ratus tujuh puluh dua)



Gambar 12. Perbandingan Realisasi TW II dibandingkan dengan Target TW II dan Target Tahun 2023 pada IKU Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu merupakan jaminan kepastian pelayanan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Jakarta kepada pelaku usaha. Dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi yang meliputi surat rekomendasi dan surat hasil pemeriksaan produksi/distribusi dan surat permintaan perbaikan dalam rangka pendaftaran produk Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta telah menetapkan batas waktu dari mulai diterimanya berkas permohonan hingga penerbitan surat rekomendasi/ surat hasil pemeriksaan dan surat permintaan perbaikan tersebut.

Pemenuhan batas waktu dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi dapat terhambat dengan keterbatasan sumber daya manusia jika dibandingkan dengan banyaknya permohonan yang masuk. Namun dengan peningkatan jumlah SDM, kemampuan dan kompetensi serta inovasi yang ada pada tata laksana kegiatan sertifikasi yang tersedia, pencapaian realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta triwulan dua dapat melebihi target yang telah ditetapkan

Adanya perubahan sistem pengajuan permohonan yang saat ini melalui Sistem OSS (Online Single Submission) yang diberlakukan sejak akhir tahun 2021 dan terkadang masih terdapat kendala, merupakan tantangan tersendiri baik bagi pelaku usaha maupun bagi Balai Besar POM di Jakarta untuk memberikan pelayanan. Dengan adanya kendala pada system ini terkadang pelaku usaha mengalami kesulitan cara mengatasinya, begitu juga dengan petugas

Mulai akhir tahun 2022 berlaku peraturan untuk proses sertifikasi CDOB bagi Pedagang Besar Farmasi (PBF) bahwa setelah dilakukan audit hanya diberi kesempatan perbaikan sebanyak maksimal dua kali dengan tenggang waktu masing-masing 40 hari kerja yang semula hanya dibatasi selama 12 bulan semua

ketidaksesuaian harus telah diselesaikan oleh pelaku usaha. Hal tersebut memerlukan usaha yang lebih baik untuk pelaku maupun petugas agar dapat menyelesaikan ketidaksesuaian sebanyak dua kali pengiriman perbaikan dengan tenggang waktu 40 hari kerja

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan di tahun 2023 yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara lain:

- a. Fasilitasi UMKM Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetika dapat meningkatkan pemenuhan keputusan sertifikasi tepat waktu. Dengan adanya fasilitasi UMKM membuat proses sertifikasi pada UMKM lebih cepat.
- b. Percepatan pelayanan prima terus dilaksanakan di Balai Besar POM di Jakarta guna mempercepat perizinan berusaha di Indonesia dalam hal ini percepatan pemberian izin edar produk, percepatan penerapan cara produksi yang baik. Balai Besar POM di Jakarta sebagai salah satu institusi penyelenggara pelayanan publik, berkewajiban memberikan pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat pengguna layanan oleh karenanya Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan (*Desk CAPA*) bagi para pelaku usaha. Perusahaan yang kesulitan memenuhi kekurangan saat audit diundang untuk melakukan diskusi terkait perbaikan dengan masing-masing auditor sehingga pemenuhan kekurangan pada saat audit lebih cepat dan lebih efektif dan efisien. Selain *Desk CAPA* dalam rangka pelayanan prima BBPOM di Jakarta juga menyelenggarakan diskusi dalam rangka pemenuhan dokumen Izin Penerapan CPPOB. Dengan diadakan pelayanan ini diharapkan pelaku usaha dapat lebih paham terkait dokumen yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan dalam rangka penerbitan Surat Izin Penerapan CPPOB. Pelaksanaan desk CAPA dan desk CPPOB diselenggarakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Diskusi ini diprioritaskan pada sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian perbaikan. Desk CAPA dan desk CPPOB sampai dengan triwulan dua 2023 telah diselenggarakan pada tanggal 2 Maret 2023 dan 19 Mei 2023 yang diselenggarakan secara luring
- c. Di CAPA juga diselenggarakan bagi PBF karena adanya peraturan untuk proses sertifikasi CDOB bagi Pedagang Besar Farmasi (PBF) bahwa setelah dilakukan audit hanya diberi kesempatan perbaikan sebanyak maksimal dua kali dengan tenggang waktu masing-masing 40 hari kerja yang semula hanya dibatasi selama 12 bulan semua ketidaksesuaian harus telah diselesaikan oleh pelaku usaha yang berlaku mulai tahun 2023. Untuk mempercepat pemenuhan penyelesaian CAPA maka BBPOM di Jakarta mengupayakan dilakukan desk CAPA baik secara bersamaan dengan desk CAPA yang terjadwal ataupun dilakukan secara sendiri oleh petugas.
- d. Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling BBPOM di Jakarta (Kerling Jakarta) yang membantu percepatan layanan sertifikasi dan membantu juga untuk meningkatkan persentase proses yang tepat waktu. Adapun pelaksanaan kerling sampai dengan triwulan dua 2023 telah diselenggarakan sebanyak 6 (enam) kali :

No	Tanggal	Lokasi
1	12 April 2023	UP PMPTSP Kecamatan Cempaka Putih
2	6 Mei 2023	UP PMPTSP Kecamatan Cipayung

No	Tanggal	Lokasi
3	10 Mei 2023	UP PMPTSP Kecamatan kramat jati
4	7 Juni 2023	UP PMPTSP Kecamatan Kelapa Gading
5	14 Juni 2023	UP PMPTSP Kecamatan Duren Sawit

- e. Sultan Betawi yaitu loket Balai Besar POM di Jakarta pada Mall Pelayanan Publik. Dengan hadirnya BBPOM di Jakarta di Mall Pelayanan Publik, pelaku usaha yang akan berkonsultasi tidak harus ke Balai Besar POM di Jakarta
- f. Balai Besar POM di Jakarta telah menyusun sistem monitoring melalui spread sheet untuk memantau permohonan yang masuk sampai dengan diterbitkannya rekomendasi oleh Balai Besar POM di Jakarta sehingga kinerja disetiap tahapan dapat terukur.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Akan terus dilakukan program desk CAPA maupun diskusi perbaikan dokumen persyaratan CPPOB yang dilakukan secara terprogram, maupun yang dilakukan secara individu oleh masing-masing auditor. Mengingat keterbatasan sumberdaya desk CAPA akan diselenggarakan secara daring. Adapun sasaran desk CAPA adalah sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian CAPA

Untuk mempercepat proses registrasi pangan olahan bagi UMKM yang telah memiliki rekomendasi dalam rangka pendaftaran pangan olahan maupun izin penerapan CPPOB maka diskusi terkait proses registrasi pangan olahan akan terus dilakukan dengan bekerja sama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan

Untuk meningkatkan kompetensi dan penyamaan persepsi secara rutin akan dilakukan sharing knowledge antara petugas di Kelompok substansi Pemeriksaan dan Kelompok substansi Infokom

Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka program kerling dan pelayanan di Mal Pelayanan Publik akan terus dilakukan

13. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

a. Perbandingan target dan realisasi TW II Tahun 2023

Tabel 20. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	72,41	111,4	Memenuhi Ekspetasi

Sarana Produksi Obat

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit).

Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa Perbaikan.

Sarana Produksi OT

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higienitas major.

Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan UMOT akan menggunakan form yang berbeda dengan sarana produksi IOT

Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana produksi Suplemen Kesehatan

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana Produksi Pangan

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
- Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan form pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan.

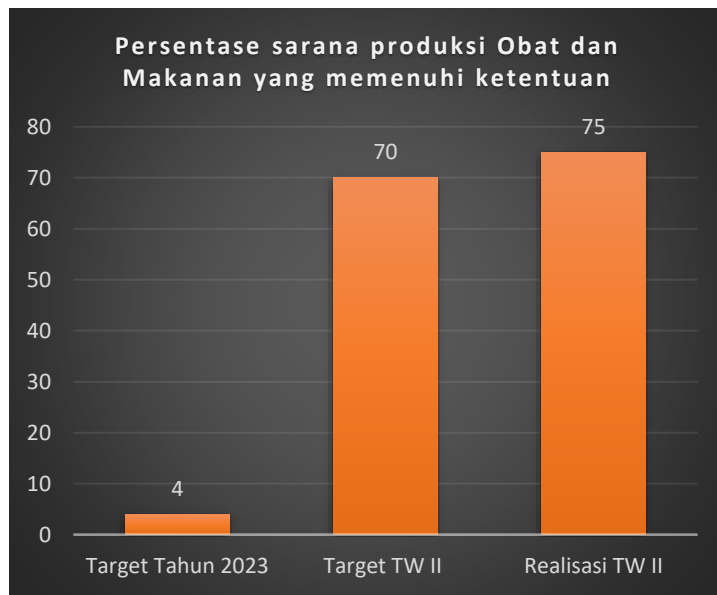
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Persentase} = \frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritas berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$

Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diprioritaskan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target TW II tahun 2023

Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta yaitu 72,41%, melebihi target 65 dengan capaian 111, 41% dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI



Gambar 13. Perbandingan Realisasi TW II dibandingkan dengan Target TW II dan Target Tahun 2023

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tabel 21. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan TW II tahun 2023 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta

NO	SARANA PRODUKSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
1.	Industri Farmasi	8	7	1
2.	Fasilitas Bahan Baku	0	0	0
3.	Fasilitas Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	2	1	1

NO	SARANA PRODUKSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
4.	Industri Obat Tradisional (IOT)	6	4	2
5.	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0	0	0
6.	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	14	6	8
7.	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	0	0
8.	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	2	2	0
9.	Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0
10.	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0
11.	Industri Kosmetik	16	11	5
12.	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	0	0	0
13.	Industri Pangan	79	60	19
14.	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	18	14	4
TOTAL		145	105	40

Realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan melebihi target karena sebagian besar sarana yang diperiksa sudah memenuhi ketentuan. Sarana produksi obat dan makanan yang telah diperiksa sebanyak 145 sarana, dengan hasil 105 sarana diantaranya Memenuhi Ketentuan. Pemeriksaan sarana produksi paling banyak pada Triwulan 2 adalah Industri Pangan dengan hasil sebanyak 76% (60 dari 79 sarana) Memenuhi Ketentuan. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh adanya simplifikasi form pemeriksaan sarana produksi pangan yaitu penghapusan pemeriksaan aspek yang berulang pada beberapa poin dan adanya kebijakan pemenuhan syarat minimal pada beberapa aspek untuk UMKM Pangan sehingga persentase tingkat kepatuhan sarana meningkat dan juga tidak adanya temuan kritikal di sarana produksi pangan MD tersebut. Pemeriksaan sarana masih akan dilaksanakan sampai akhir tahun sesuai dengan target sarana produksi yaitu 296 sarana produksi.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan lain yang diupayakan untuk meminimalisasi kegagalan pencapaian kinerja antara lain :

- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, antara lain pelatihan inspektur GMP. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga lebih berkualitas.

- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi obat dan makanan yang melakukan pelanggaran.
- *Desk CAPA (corrective action preventive action)* atas hasil pemeriksaan akan membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan pembinaan terhadap sarana industry pangan		Melakukan pembinaan terhadap sarana industry pangan	Des 2023

14. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi TW II tahun 2023*

Tabel 21. Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	83,28	106,77	Memenuhi Ekspetasi

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat;

Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan

Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika;

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian

Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Sarana Distribusi MK} = \frac{\text{Jumlah Sarana distribusi OM yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- (1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- (2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- (3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- (4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

b. Perbandingan realisasi dan target TW II dengan target 2023

Realisasi Persentase Sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta yaitu 83,28%, sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 78% sehingga capaian 106,77% dengan kriteria "MEMENUHI EKSPEKTASI"



Gambar 14. Perbandingan Realisasi TW II dibandingkan dengan Target TW II dan Target Tahun 2023

c. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

NO	SARANA DISTRIBUSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
1.	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	62	49	13
2.	Apotek	72	59	13
3.	Toko Obat	12	11	1
4.	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	0	0	0
5.	Rumah Sakit (RS)	37	36	1
6.	Puskemas	39	39	0
7.	Klinik	41	30	11
8.	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	2	2	0
9.	Kantor Kesehatan Pelabuhan	0	0	0
10.	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	71	62	9
11.	Fasilitas Distribusi Suplemen	29	29	0
12.	Fasilitas Distribusi Kosmetik	100	87	13
13.	Klinik Kecantikan	19	11	8

NO	SARANA DISTRIBUSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
14.	Fasilitas Distribusi Pangan	192	148	44
TOTAL		676	563	113

Realisasi sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan melebihi target karena sebagian besar sarana yang diperiksa sudah memenuhi ketentuan. Beberapa hal yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase distribusi obat yang memenuhi syarat adalah:

- Kesadaran pelaku usaha terhadap kepatuhan terhadap peraturan meningkat
- PBF harus memiliki sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga wajib menerapkan CDOB sebelum beroperasi
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*)

Sarana distribusi obat dan makanan yang telah diperiksa sebanyak 676 sarana, dengan hasil 563 sarana Memenuhi Ketentuan. Pemeriksaan sarana distribusi paling banyak pada Triwulan 2 adalah distribusi Pangan dengan jumlah 192 sarana.

Sarana distribusi paling banyak Tidak Memenuhi Ketentuan adalah sarana distribusi pangan, PBF, apotek, klinik dan diskos. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya program intensifikasi pengawasan kosmetik di sarana klinik kecantikan di bulan Juni serta intensifikasi pengawasan peredaran pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri pada bulan April sehingga terdapat temuan produk yang kritikal seperti tanpa izin edar dan produk kedaluwarsa. Pemeriksaan sarana masih akan dilaksanakan sampai akhir tahun sesuai dengan target sarana produksi yaitu 1070 sarana distribusi.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan antara lain :

- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, maka hasil pemeriksaan sarana distribusi lebih berkualitas.
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (*proses projustitia* maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran.

e. **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan pembinaan terhadap sarana Distribusi pangan, kosmetik dan saryanfar		Melakukan pembinaan terhadap sarana Distribusi pangan, kosmetik dan saryanfar	Des 2023

15. **Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta.**

a. **Perbandingan target triwulan II dengan target TW II**

Tabel 22. Realisasi indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks Pelayanan Publik	4,55	-	-	-

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

b. **Perbandingan realisasi dan target dengan target tahun 2023**

Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta merupakan indikator yang dapat dilihat nilainya pada bulan 07 (Juli) yang diambil dari penilaian UPP BPOM yang akan ditetapkan sehingga pada triwulan II tahun 2023 ini belum ada realisasi dan capaian.

16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan target triwulan II dengan realisasi TW II

Tabel 24. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	38,3	63,67	166,24	Tidak Dapat Disimpulkan

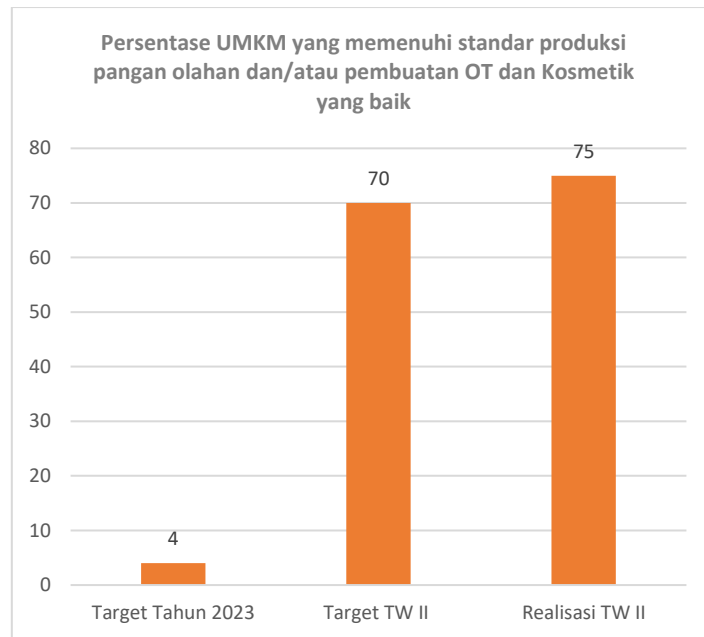
Kriteria UMKM:

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- Untuk UMKM OT mengacu pada Permenkes 26 Tahun 2018
- Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Target sampai triwulan dua dihitung dari rata-rata target pendampingan UMKM Obat Tradisional, UMKM Kosmetika dan UMKM pangan olahan. Adapun target realisasi pendampingan UMKM obat tradisional sampai triwulan dua sebesar 57 % berupa kegiatan penetapan target, bimtek, sertifikasi dan monitoring evaluasi. Target realisasi pendampingan UMKM kosmetika sebesar 70 % berupa penetapan target, bimtek, dan pelaksanaan pendampingan. Target realisasi pendampingan UMKM pangan olahan sebesar 34 % berupa penetapan target, pendampingan dan penerbitan Izin Penerapan CPPOB. Sehingga jika rata-rata dari ketiga jenis sarana maka target triwulan satu adalah sebesar 56,00 %. Realisasi juga diperhitungkan dari rata-rata masing-masing capaian pendampingan masing-masing sarana. Sampai dengan triwulan dua untuk UMKM Obat tradisional telah dilakukan penetapan target, bimtek, sertifikasi dan monitoring evaluasi, untuk pendampingan UMKM kosmetik telah dilakukan penetapan target, bimtek dan pelaksanaan pendampingan, sedangkan pendampingan UMKM pangan olahan telah dilakukan penetapan target, bimtek, fasilitasi pendampingan dan penerbitan Izin Penerapan CPPOB

b. Perbandingan realisasi dan capaian TW II dengan target tahun 2023

Realisasi pada IKU "Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik" pada triwulan II 63,67% dari target yang ditetapkan di triwulan II yaitu 38,3% dengan capaian 166,24% yang mana masuk kriteria "Tidak dapat disimpulkan".



Gambar 15. Perbandingan Realisasi TW II dibandingkan dengan Target TW II dan Target Tahun 2023 pada IKU Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

- 1) Pelatihan bagi fasilitator Balai Besar POM di Jakarta yang tidak tepat waktu oleh Pusat sehingga waktu pelaksanaan Bimtek di Balai bagi pelaku usaha mengalami penundaan waktu
- 2) Bimbingan teknis bagi pelaku usaha peserta fasilitasi yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan pengetahuan sehingga diharapkan pelaku usaha dapat segera mendapatkan sertifikat untuk fasilitas produksi yang pada akhirnya segera mendapatkan nomor izin edar untuk produk
- 3) Terbatasnya jumlah fasilitator UMKM di Balai Besar POM di Jakarta untuk mendampingi pelaku usaha di DKI Jakarta. Pada tahun 2023 BBPOM di Jakarta melakukan kolaborasi untuk fasilitasi UMKM pangan olahan dengan Dinas PPKUKM dengan melibatkan para pendamping dari Dinas PPKUKM yang telah dilatih pada tahun sebelumnya.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Melakukan percepatan visitasi dan penggalangan komitmen bagi pelaku usaha UMKM yang akan didampingi pada tahun 2023, sehingga diharapkan program fasilitasi dapat dimulai lebih awal
- Melakukan percepatan pelaksanaan Bimtek bagi pelaku usaha UMKM yang akan didampingi pada fasilitasi tahun 2023 baik UMKM yang akan didampingi secara langsung oleh BBPOM di Jakarta dengan dibantu oleh fasilitator eksternal, maupun yang akan didampingi oleh pendamping dari Dinas

PPKUKM. Bimtek untuk pelaku usaha pangan olahan yang akan didampingi langsung oleh BBPOM di Jakarta telah diselenggarakan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2023 dan bimtek bagi pelaku usaha pangan olahan yang akan didampingi oleh pendamping dari Dinas PPKUKM telah diselenggarakan di wilayah Jakarta Timur pada tanggal 20, 21 dan 24 Maret 2023 serta di wilayah Jakarta Barat pada tanggal 5, 6 dan 7 Juni 2023. Sedangkan bimtek untuk pelaku usaha di bidang kosmetik diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2022 dan bimtek untuk pelaku usaha di bidang obat tradisional diselenggarakan pada tanggal 5 dan 6 April 2023. Dengan adanya bimtek tersebut diharapkan pelaku usaha lebih memahami pentingnya dan cara melakukan produksi yang baik dan memiliki komitmen untuk melakukan produksi dengan cara yang baik secara konsisten

- Balai Besar POM di Jakarta melakukan kolaborasi fasilitasi UMKM Pangan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Provinsi DKI Jakarta untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha UMKM Pangan yang dapat didampingi untuk mendapatkan Nomor Izin Edar Pangan Olahan (NIE MD). Dengan adanya program kolaborasi tersebut diharapkan pelaku usaha mendapatkan kemudahan berusaha dan perizinan. Pendampingan diberikan kepada para pelaku usaha produsen pangan olahan beskala mikro kecil menengah (UMKM) untuk mendapatkan izin edar.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

- a) Balai Besar POM di Jakarta bekerja sama dengan Dinas PPKUM melakukan visitasi luring untuk melakukan seleksi terhadap pelaku usaha yang memungkinkan untuk difasilitasi dalam waktu dekat. Visitasi bertujuan untuk melihat kesiapan pelaku usaha dalam mempersiapkan tempat produksi sehingga diharapkan fasilitasi dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran
- b) Balai Besar POM di Jakarta mengadakan pelatihan fasilitator UMKM yang berasal dari personil Jakpener dalam upaya peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam membantu pelaku usaha dalam menerapkan sistem CPPOB sehingga pelaku usaha dapat segera memperoleh izin penerapan CPPOB sebagai persyaratan pembuatan akun perusahaan pada system sertifikasi produk pangan Badan POM

Sasaran Strategis-5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

17. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi TW II dengan target TW II*

Tabel 24. Realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,8	95,83	100,03	Memenuhi Ekspetasi

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- 1) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- 2) KIE langsung ke masyarakat; dan
- 3) KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

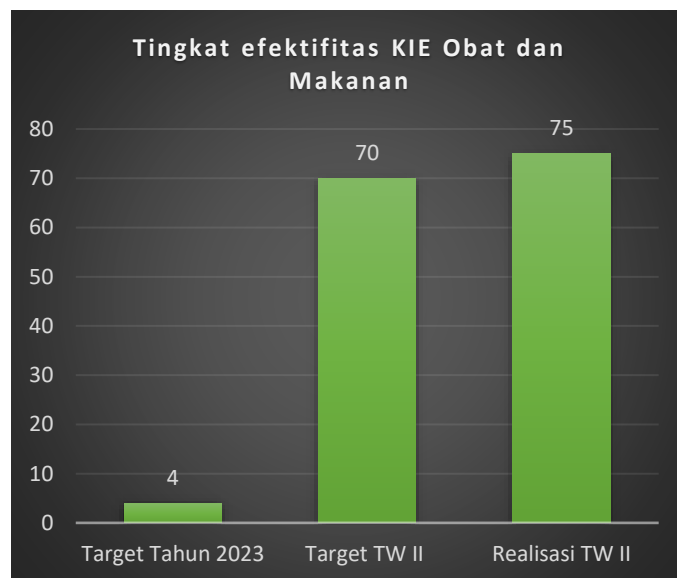
Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuesioner dan online survey. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Hasil pengukuran tingkat efektivitas KIE dikategorikan sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	<i>Kurang Efektif</i>
65,01-75,00	<i>Cukup Efektif</i>
75,01-85,00	<i>Efektif</i>
85,01-95,00	<i>Sangat Efektif</i>
95,01-100	<i>Sangat Efektif Sekali</i>

Apabila dilihat dari masing-masing indikator pengukuran, diperoleh hasil indikator pemahaman dan manfaat memiliki indeks tertinggi sebesar 96,44 kemudian diikuti indeks ragam kegiatan dan minat sebesar 94,15. Nilai indikator manfaat dan pemahaman yang tinggi menandakan manfaat dan tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima dari kegiatan KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta sudah baik.

b. Perbandingan realisasi dan target TW II dengan target tahun 2023

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta triwulan II tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 95,83 (Sangat Efektif Sekali) dan telah melampaui target triwulan II sebesar 95,8 dengan capaian sebesar 100,03%, kriteria Memenuhi ekspektasi. Nilai ini diperoleh dari 218 responden suvei yang merupakan masyarakat yang telah terpapar kegiatan KIE Obat dan Makanan pada periode triwulan I-II tahun 2023.



Gambar 16. Gambar Realisasi TW II dibandingkan dengan Target TW II dan Target Tahun 2023

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan capaian kinerja tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan, BBPOM di Jakarta Triwulan II tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Adanya perkuatan koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan KIE Obat dan Makanan dengan stakeholder terkait seperti Tokoh Masyarakat, Pemerintah Daerah, OPD, dan media.
2. Terselenggaranya kegiatan KIE berupa Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan bersama Tokoh Masyarakat Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si, secara tatap muka sebanyak 20 (Dua puluh) titik di Wilayah DKI Jakarta dengan total peserta sebanyak 1000 orang, KIE melalui Operasional Mobil Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan takjil di bulan Ramadhan serta Sosialisasi Pemberdayaan Obat dan Makanan Pramuka Jakarta Sadar Obat dan Makanan Aman Informasi Nilai Gizi.

3. Narasumber BBPOM di Jakarta pada berbagai kegiatan dengan stakeholder, misalnya Penyuluhan Keamanan Pangan bertujuan memberikan bimbingan teknis mengenai Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), keamanan pangan serta label pangan kepada pelaku usaha pangan dan masyarakat.
4. Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan KIE mengenai program prioritas keamanan pangan melalui program PJAS aman, Desa Pangan Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, khususnya dalam pembentukan dan pemberdayaan kader keamanan pangan di sekolah, desa, dan pasar di wilayah intervensi Kota Administrasi Jakarta Utara.
5. Terselenggaranya kegiatan KIE Obat dan Makanan melalui kegiatan Pameran Jakarta Fair tahun 2023 pada 14 Juni-16 Juli 2023 sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi terkait Obat dan Makanan melalui stan BBPOM di Jakarta yang menyediakan berbagai informasi berupa media televisi berisi iklan layanan informasi Obat dan Makanan, pajangan contoh produk Obat dan Makanan berizin edar BPOM, leaflet-leaflet informasi, brosur pelayanan publik, –e-book sertifikasi Obat dan Makanan, dummy contoh 4 bahan berbahaya pada pangan (Boraks, Formalin, Rhodamin B, dan Methanyl Yellow), link integrasi informasi dan pelayanan publik BBPOM di Jakarta melalui <https://s.id/garasi-jakarta>.
6. Intensifikasi penggunaan media sosial sebagai media KIE Obat dan Makanan kepada masyarakat dengan berbagai topik terkini mengenai isu Obat dan Makanan.

Untuk menyempurnakan capaian kinerja tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dapat dilakukan rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

Untuk konten KIE Obat dan Makanan dalam bentuk *ree/s* dan berbagai infografis yang dipublikasikan melalui media sosial untuk meningkatkan ragam dan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Triwulan II tahun 2022 ini antara lain:

1. Metode KIE secara tatap muka yang dinilai efektif dalam menyampaikan informasi Obat dan Makanan secara langsung kepada masyarakat serta meningkatkan pula keterlibatan dan pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan KIE Obat dan Makanan Pemberian materi melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terutama terkait keamanan pangan kepada komunitas masyarakat
2. Pemberian materi melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terutama terkait keamanan pangan kepada komunitas masyarakat.
3. Penyebaran konten KIE melalui media sosial dengan berbagai tema dan bentuk seperti infografis, videografis, dan video. Salah satunya adalah implementasi inovasi Aripin (Asupan Rabuan Pintar) yang menyediakan konten mengenai obat dan makanan yang disosialisasikan setiap hari Rabu di media sosial BBPOM di Jakarta (Instagram, Facebook, dan Twitter).
4. Penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui layanan ULPK, media sosial dan sms blast

5. Adanya upaya penganeekaragaman KIE dan publikasi informasi melalui kuis pada media sosial yang dilakukan setiap bulan untuk meningkatkan ragam dan minat akan informasi yang telah disosialisasikan

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Untuk meningkatkan indikator tingkat minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan, dapat dilakukan upaya penganeekaragaman media penyampaian KIE seperti media cetak, media elektronik (radio, iklan layanan masyarakat di televisi, videotron), dan media social, memperbanyak topik atau tema KIE sesuai dengan kebutuhan masyarakat mencakup lingkup usia dan gender.	Implementasi kegiatan Sosialisasi melalui media sosial melalui ARIPreels dengan muatan materi yang berbeda-beda sesuai agenda setting BPOM sehingga konten informasi tidak monoton dan dapat meningkatkan minat masyarakat. Informasi pelayanan publik juga telah dipublikasikan melalui media cetak dan media luar ruangIN, Kosidah Jakarta, dan .		Des 2023

18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

a. Perbandingan target dan realisasi TW II dengan target TW II

Tabel 25. Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	55 (Progress)	55 (Progress)	100,00	Memenuhi Ekspetasi

PJAS adalah kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau e-commerce. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

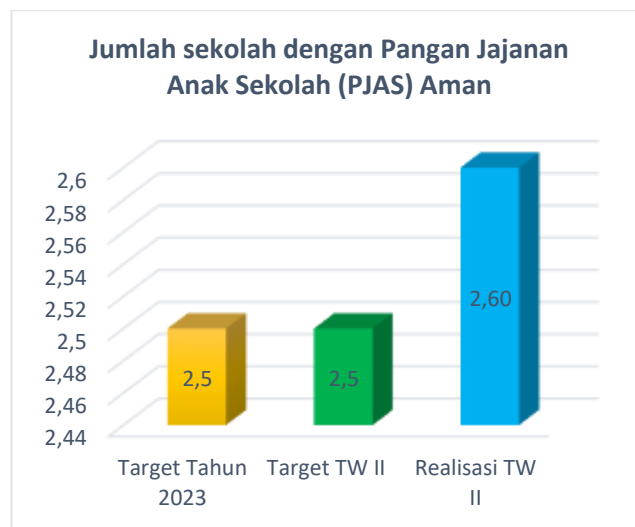
Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, dan sertifikasi PJAS Aman.

Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:

- 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif,
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah,
- 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Realisasi dan capaian untuk indikator jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta bulanan dan triwulan dihitung dengan presentase progress tahapan intervensi, sedangkan target tahun 2023 memiliki satuan jumlah sekolah sehingga nilai realisasi dan capaian triwulan II tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2023.

b. Perbandingan realisasi dan target TW II dengan target tahun 2023



Gambar Perbandingan Realisasi TW II dibandingkan dengan Target TW II dan Target Tahun 2023

Realisasi progress tahapan intervensi keamanan PJAS pada Triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 55% dengan telah terselenggaranya kegiatan Advokasi Lintas Sektor PJAS (20%), Sosialisasi Keamanan Pangan (10%), Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah (15%), dan Pemberian Paket Edukasi/Produk informasi Keamanan Pangan (10%). Target progress capaian tahapan intervensi keamanan PJAS pada Triwulan II tahun 2022 adalah 55%, sehingga diperoleh capaian sebesar 100,00% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab keberhasilan capaian program intervensi PJAS aman pada Triwulan II ini yaitu telah terbentuknya forum komunikasi terhadap sekolah-sekolah intervensi sehingga koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan.

Sebagai rekomendasi pelaksanaan program intervensi PJAS aman pada periode selanjutnya ialah dapat dilakukan peningkatan koordinasi dengan sekolah-sekolah intervensi terkait pembentukan Tim Keamanan Pangan dan penyusunan dokumen keamanan pangan dengan menyediakan link terpadu yang dapat diakses untuk memudahkan dalam proses penyusunan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sebagai mitigasi risiko pencapaian kinerja di periode mendatang, telah dilakukan upaya peningkatan koordinasi melalui kegiatan Audiensi serta Advokasi dengan lintas sektor terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara serta Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara serta telah dibentuk forum komunikasi dengan sekolah-sekolah intervensi untuk memudahkan dalam koordinasi terkait pelaksanaan program.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Perkuatan sinergi dengan pemerintah daerah, sekolah-sekolah lokus intervensi untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Keamanan Pangan Sekolah melalui forum komunikasi menggunakan Whatsapp dan tatap muka	Telah dibentuk forum komunikasi dengan sekolah-sekolah intervensi melalui Whatsapp sebagai media komunikasi pelaksanaan program PJAS aman.		

19. Jumlah desa pangan aman

a. *Perbandingan target dan realisasi TW II dengan target TW II*

Tabel 26. Realisasi Jumlah desa pangan aman

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Jumlah desa pangan aman	40 (Progress)	45 (Progress)	100,00	Memenuhi Ekspetasi

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.

Desa pangan aman ditentukan dari kriteria:

- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif,
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa,
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

b. Perbandingan realisasi dan target kinerja TW II dengan target tahun 2023



Gambar 18. Perbandingan Realisasi TW II dibandingkan dengan Target TW II dan Target Tahun 2023

Realisasi progress tahapan intervensi Desa Pangan Aman pada Triwulan II tahun 2023 ialah sebesar 45% dengan telah terselenggaranya kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa (20%), Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test dll (5%), Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) (15%), Bimtek Komunitas sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas terhadap 1 kelurahan dari 7 kelurahan intervensi (2%), Fasilitasi Keamanan Pangan ke-1 dari 1 kelurahan (1%), Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Pre Intervensi dari 1 kelurahan (1%), dan Pengawasan terhadap 1 kelurahan intervensi tahun 2022 (1%). Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi Desa Pangan Aman telah mencapai target Triwulan II yaitu 45% dengan capaian 100,00% kriteria Memenuhi ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab keberhasilan capaian program Desa Pangan Aman pada Triwulan II ini yaitu adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan OPD terkait keamanan pangan sebagai hasil kegiatan Audiensi dan Advokasi, telah terbentuknya forum komunikasi dengan kelurahan-kelurahan intervensi yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan tahapan kegiatan serta telah terbentuk Tim dan Kader Keamanan Pangan Kelurahan sebagai pelaksana program keamanan pangan di kelurahan.

Sebagai rekomendasi untuk penyempurnaan pencapaian kinerja program Desa Pangan Aman di periode selanjutnya dapat dilakukan pemantauan dan pendampingan terhadap pelaksanaan fasilitasi keamanan pangan oleh Kader Keamanan Pangan sehingga tujuan intervensi keamanan pangan terhadap komunitas dapat tercapai dengan baik.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja adalah adanya koordinasi dan sinergitas dengan kegiatan lintas sektor terutama program yang ada di kelurahan terkait keamanan pangan sehingga pelaksanaan intervensi Desa Pangan Aman dapat diintegrasikan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan. Adanya sinergitas ini dimulai melalui forum Advokasi Kelembagaan Desa yang dilaksanakan secara terpadu dengan Program PJAS aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Selain itu, telah terbentuknya Tim dan Kader Keamanan Pangan memudahkan untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan di kelurahan intervensi.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pemantauan terhadap rencana aksi yang telah disusun kelurahan intervensi sebagai monitoring dalam kegiatan pengawalan	Pengawalan Desa Pangan Aman yang telah diintervensi tahun sebelumnya	Lanjutan Pengawalan Desa Pangan Aman yang telah diintervensi tahun sebelumnya	Triwulan II-IV

20. Jumlah pasar aman pangan naman berbasis komunitas

a. Perbandingan target triwulan II dengan target TW II

Tabel 27. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	70 (Progress)	75 (Progress)	107,14	Memenuhi Ekspetasi

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan kerangka acuan kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplai dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek

petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplai dapat berupa penerapan CRPB oleh pedagang pasar di pasar rakyat. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Jumlah pasar aman dihitung dari jumlah pasar aman yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Terjadi penurunan %TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada monev Tahap 1 dibandingkan tahap 2

b. Perbandingan realisasi dan capaian TW II dengan target tahun 2023

Realisasi progress tahapan intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Triwulan II tahun 2023 ialah sebesar 75% dengan telah terselenggaranya kegiatan Advokasi (20%), Survei Pasar (5%), Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator (15%), Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar (15%), Penyuluhan (10%), dan Pengawalan (10%). Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah mencapai target Triwulan II yaitu 70% dengan capaian 107,14% kriteria Memenuhi ekspektasi.



Gambar 19. Perbandingan Realisasi TW II dibandingkan dengan Target TW II dan Target Tahun 2023

Realisasi dan capaian untuk indikator jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta bulanan dan triwulan dihitung dengan presentase progress tahapan intervensi,

sedangkan target tahun 2023 memiliki satuan jumlah pasar sehingga nilai realisasi dan capaian triwulan II tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Faktor keberhasilan tercapainya kinerja tahapan progress intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas antara lain adanya koordinasi yang baik dengan Pengelola Pasar dan Perumda Pasar, adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan OPD terkait keamanan pangan sebagai hasil kegiatan Audiensi dan Advokasi dengan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, telah terbentuknya forum komunikasi yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan tahapan kegiatan serta telah terbentuknya Fasilitator Pasar Aman sebagai kepanjangan tangan dari BPOM yang dapat melakukan implementasi pengawasan pangan di pasar.

Sebagai rekomendasi perbaikan pencapaian kinerja pada periode selanjutnya yaitu pemantauan terhadap pelaksanaan sampling dan pengujian oleh petugas pasar agar sesuai dengan pedoman sampling..

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja adalah optimalisasi koordinasi dengan lintas sektor pengelola pasar melalui media Whatsapp sehingga koordinasi dapat terus berjalan dengan efektif dan kontinu serta peran Fasilitator Pasar Aman yang dapat melakukan tugas pengawasan keamanan pangan di pasar.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Intensifikasi komunikasi dengan petugas pengelola pasar dalam pelaksanaan bimtek pengelola pasar, sampling dan penyuluhan	Telah terlaksananya bimtek pengelola pasar, sampling, dan penyuluhan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan		

Sasaran Strategis-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. *Perbandingan target dan realisasi TW II dengan tahun 2023*

Tabel 29. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40	44,29	110,73	Memenuhi Ekspetasi

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat satu tahun}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk laboratorium}} \times 100\%$$

Catatan :

1. Jumlah target sampel Obat (Penyebut rumus A) :
 - a) B01-B11 menggunakan target DIPA,
 - b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
2. Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) :

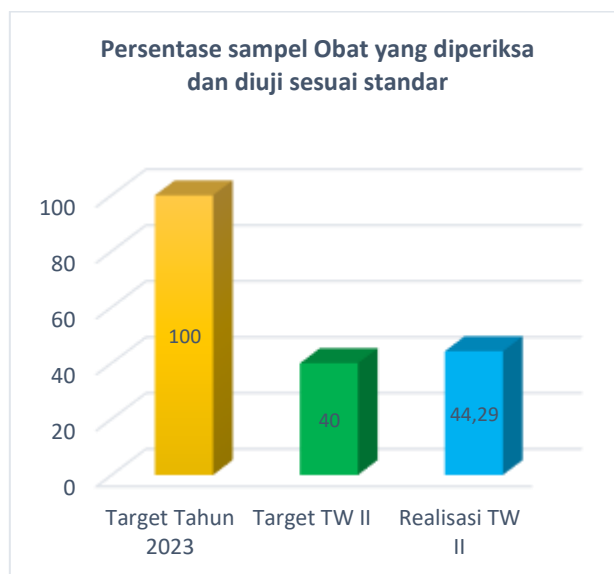
- a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan selama 1 tahun (target DIPA).
- b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)

Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)

Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

b. Perbandingan realisasi dan capaian TW III denga target tahun 2022

Target indikator “Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” pada TW II adalah 40% dengan realisasi indikator pada TW II sebesar 44.29%, capaiannya yaitu 110.73% termasuk kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.



Gambar 20. Perbandingan Realisasi TW II dibandingkan dengan Target TW II dan Target Tahun 2023 pada IKU Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tingginya capaian indikator kinerja Triwulan II tahun 2023 tersebut disebabkan oleh adanya penambahan jumlah sampel mulai tahun 2022 terkait dengan penerapan Regionalisasi Laboratorium. Penambahan jumlah sampel dalam rangka regionalisasi laboratorium ini belum diperhitungkan secara pasti dalam penetapan target bulanan tahun 2023 (penetapan target dilakukan sebelum target sampel regionalisasi ditetapkan). Sampel regional diterima dari BBPOM Bandung, BBPOM Serang, BBPOM Yogyakarta, BBPOM Semarang serta Loka POM yang dikoordinasikan oleh Balai tersebut. Sampel yang diterima sampai triwulan II tahun 2023 sebanyak 1063 sampel dan sudah selesai uji sebanyak 837 sampel (78.74%), namun yang

diperiksa dan diuji sesuai standar sebanyak 810 sampel (96,77%), karena terdapat 21 sampel yang melewati timeline pengujian dan 6 sampel yang tidak memenuhi syarat pengujian yaitu 1 sampel Kosmetik (TMS kadar Metanol) 5 sampel Obat Tradisional (1 sampel TMS kadar Etanol, 1 sampel TMS kadar Coffein, 1 sampel TMS APM Entero, 1 sampel TMS ALT dan 1 sampel TMS Clostridia)

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

- menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.
- melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebanyak 12 metode analisis dari laboratorium kosmetik, 12 metode analisis dari laboratorium obat tradisional dan Suplemen Kesehatan dan 12 metode analisis dari laboratorium obat
- Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya.
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015, yang merupakan pengakuan pihak ketiga terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian.
- Pemanfaatan Alat laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium secara maksimal.
- Pemenuhan peralatan dan kebutuhan pengujian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengujian

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Sudah dilaksanakan namun masih harus ditingkatkan	penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Akhir tahun 2023
2	Program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor).	Sudah dilaksanakan namun masih harus ditingkatkan	Program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor).	Akhir tahun 2023

22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan realisas capaian TW II dengan target TW II

Tabel 29. Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40	46,42	116,05	Memenuhi Ekspetasi

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area.

Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.

Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP

Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota) Persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		=	$\frac{A + B}{2}$
A	$\frac{\text{= Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel makanan satu tahun}}$	x	100%
B	$\frac{\text{= Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel makanan yang masuk laboratorium}}$	x	100%

Catatan :

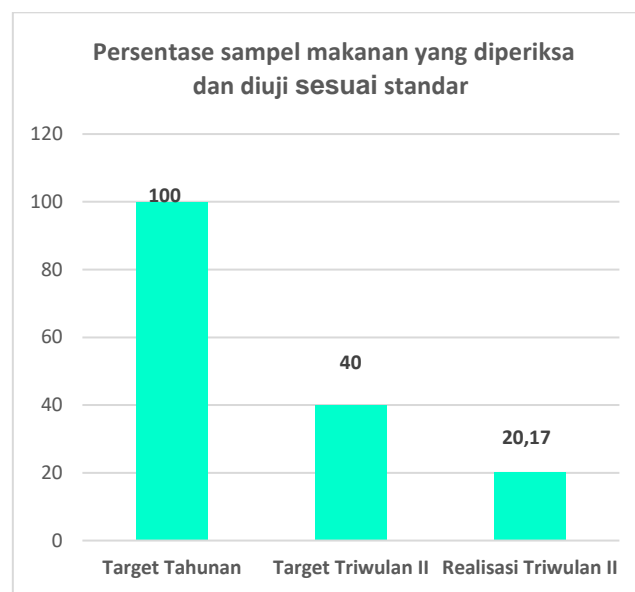
1. Jumlah target sampel Makanan (Penyebut rumus A) :
 - a) B01-B11 menggunakan target DIPA,
 - b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling
2. Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) :

- a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel Makanan selama 1 tahun (target DIPA).
- b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)

Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium.

Capaian persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta mencapai target yang ditetapkan yaitu 107.44% dengan kriteria “**baik**”. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pengujian laboratorium Balai Besar POM di Jakarta telah berhasil memenuhi standar yang ditetapkan Badan POM.

b. Perbandingan realisasi dan capaian TW II target tahun 2023



Gambar 21. Gambar Perbandingan Realisasi TW II dibandingkan dengan Target TW II dan Target Tahun 2023 pada IKU persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Target indikator “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” pada TW II ini adalah 40% dengan realisasi indikator pada TW II sebesar 20,17% dengan capaiannya yaitu 116,16 % termasuk kriteria “memenuhi ekspektasi” sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi realisasi untuk mempertahankan capaian pada triwulan selanjutnya.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tingginya capaian indikator kinerja Triwulan II tahun 2023 tersebut disebabkan adanya penambahan jumlah sampel terkait dengan penerapan Regionalisasi. Sampel regional diterima dari BBPOM di Bandung, BBPOM Semarang, BBPOM Serang, BBPOM di Yogyakarta, Loka POM Surakarta, Banyumas, Tasikmalaya dan

Tangerang yang dikoordinasikan oleh Balai-balai tersebut. Hal ini turut mempengaruhi tingginya capaian sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

Pada triwulan II jumlah sampel yang diperiksa sesuai standar berjumlah 329 sampel dan jumlah sampel yang diuji sesuai standar berjumlah 323 sampel.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- a) Banyaknya sampel yang disampling dan dikirim ke laboratorium pada pertengahan bulan sehingga pada akhir bulan juni sampel belum selesai proses pengujian dan dihitung sebagai sampel selesai pada triwulan berikutnya
- b) Peningkatan kompetensi laboratorium dan personil penguji juga dilakukan dengan mengikutsertakan personil penguji dalam berbagai bimbingan teknis dan magang.
- c) Pemanfaatan dan pemenuhan peralatan laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium secara maksimal guna menjamin kelancaran dan pelaksanaan pengujian.
- d) Peningkatan Ruang Lingkup Pengujian terus menerus dilakukan guna menjamin tersedianya metoda yang valid dalam pengujian dengan meningkatkan metode uji dan melakukan verifikasi Metoda Analisis, mengikuti Uji profisiensi baik secara internal maupun eksternal, juga mengikuti Uji Kolaborasi antar laboratorium. Peningkatan metode uji tersebut juga meliputi penambahan jenis metode untuk satu parameter uji sehingga diharapkan dapat membantu dan memberikan solusi terhadap kendala kerusakan alat yang dipakai secara rutin agar kecepatan pengujian tidak terhambat

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Sudah dilaksanakan, namun perlu dilaksanakan terus secara berkelanjutan dan konsisten	penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Akhir tahun 2023
2	Meningkatkan koordinasi yang baik dengan tim inspeksi mengenai waktu sampling dan pengiriman sampel ke laboratorium agar	Sudah dilaksanakan, namun masih perlu dilaksanakan	Melakukan koordinasi secara berkala dan berkesinambungan mengenai waktu sampling dan	Akhir tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
	dilakukan di awal bulan untuk memperlancar proses pengujian	secara berkelanjutan	pengiriman sampel ke laboratorium.	
3	Peningkatan kompetensi laboratorium dan personil penguji	Sudah dilaksanakan, namun masih perlu dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan	Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN	Akhir tahun 2023
4	Program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor).	Sudah dilaksanakan, namun perlu ditingkatkan	Program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor).	Akhir tahun 2023

Sasaran Strategis-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. *Perbandingan realisasi capaian TW II dengan target TW II*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	30	45,01	150,03	Tidak Dapat Disimpulkan

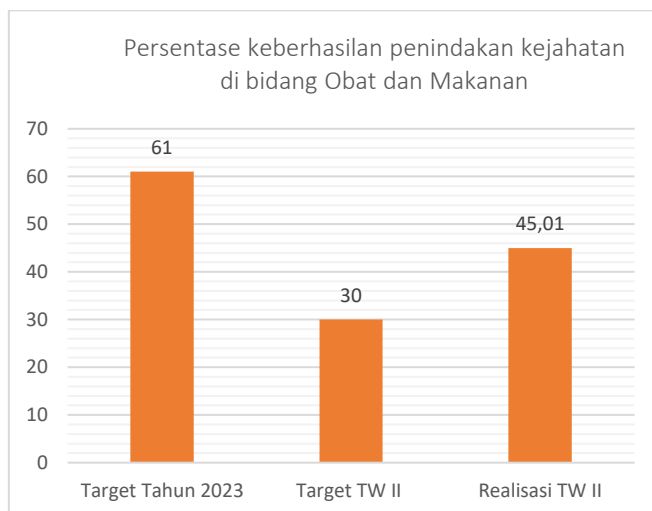
Penilaian keberhasilan penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over*, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut sebagai berikut:

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b) Tahap 1 sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c) P21 sebesar 30% -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D [d / jumlah perkara]

Nilai Tingkat Keberhasilan:

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{jumlah capaian} / \text{target perkara})$$

b. *Perbandingan realisasi dan target triwulan II dengan target tahun 2023*



Gambar 22. Perbandingan target, realisasi TW II dan target tahun 2023

Capaian persentase keberhasilan Penindakan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta periode triwulan kedua atau April - Juni 2023 adalah tidak dapat disimpulkan. Hasil ini diperoleh berdasarkan

perbandingan realisasi terhadap target triwulan ini yang mencapai 45,01 atau 150,03%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Tim Kerja Penindakan BBPOM di Jakarta telah berhasil memenuhi indikator kinerja strategis yang ditetapkan yakni meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Analisa terhadap keberhasilan Tim Penindakan BBPOM di Jakarta untuk mencapai target meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana di bidang obat dan makanan terdiri atas beberapa faktor, antara lain:

1. Implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara efektif

Sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang diterapkan meliputi penyelesaian perkara, patroli siber dan operasi intelijen. Secara internal dibuat sistem menggunakan *spreadsheet* yang dapat diakses oleh seluruh personel dimana saja dan kapan saja yakni Menara (Monitoring Penyelesaian Berkas Perkara). *Spreadsheet* ini dijalankan sejak tahun 2020 hingga saat ini. Dengan adanya monitoring kinerja secara konsisten, maka kendala dan hasil kerja dapat dengan mudah dipantau dan diatasi. Disamping itu monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan pula secara berkala melalui pertemuan rutin (secara daring/luring) membahas progres penyelesaian perkara, permasalahan dan rencana tindak lanjutnya.

2. Koordinasi dan kerja sama dengan Tim Penyidikan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan berjalan dengan optimal

Perubahan sistem kerja menjadi lebih agile (lincah) dan dinamis memungkinkan untuk tim penindakan bekerja sama dengan tim dari unit lain dengan tujuan untuk mengedepankan kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Pada triwulan kedua ini kolaborasi antara tim penindakan BBPOM di Jakarta dengan tim penyidikan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM masih berlanjut. Terdapat tambahan 2 perkara dengan status SPDP.

Hingga berakhirnya triwulan kedua ini, proses penyelesaian berkas perkara masih berjalan dan dilakukan juga evaluasi kerja sama untuk mengatasi kendala yang dihadapi.

3. Peningkatan Peningkatan kerja sama dengan lintas sektor terkait yang semakin solid

Salah satu tugas pokok dan fungsi Penyidik PNS adalah menjalankan koordinasi dengan CJS lainnya seperti Korwas PPNS Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri di wilayah DKI Jakarta. Pencapaian pada triwulan pertama ini merupakan hasil dari pelaksanaan koordinasi dengan CJS yang berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara. Sebagai hasil dari koordinasi tersebut, dapat terlaksana proses penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa (tahap 2). Selain itu juga terdapat capaian penyerahan berkas (tahap 1) atas perkara tunggakan dan penyelesaian perkara tunggakan lainnya.

4. Pelaksanaan asistensi atau bantuan teknis oleh Deputi Bidang Penindakan yang lebih optimal

Salah satu upaya yang terus dilakukan oleh PPNS Balai Besar POM di Jakarta dalam penanganan/penyelesaian perkara khususnya perkara tunggakan adalah melalui pelaksanaan asistensi/pemberian bantuan teknis oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah kerja sama penindakan dengan tim penyidikan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM. Selain itu, upaya pencapaian kinerja ditunjang dari 4 (empat) kegiatan yakni intelijen, siber, cegah tangkal dan penyidikan yang semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kegiatan cegah tangkal meliputi kegiatan analisis terhadap data hasil pengawasan yang telah dilakukan. Intelijen memanfaatkan analisis hasil pengawasan tersebut sebagai sumber informasi awal. Sumber informasi lainnya juga didapat dari kegiatan patroli siber oleh tim siber, pengaduan masyarakat, dan juga dari akses informasi yang dimiliki. Selanjutnya kegiatan penyidikan berkontribusi terhadap penyelesaian perkara. Kombinasi kegiatan ini yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Selain itu, kegiatan koordinasi salah satunya melalui Gelar Perkara rutin yang diselenggarakan baik secara luring maupun daring dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan Direktorat Penyidikan BPOM juga menjadi kegiatan penunjang penyelesaian berkas perkara yang ditangani. Melalui gelar perkara tersebut dapat diidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik dan dihasilkan rekomendasi dalam upaya penyelesaian berkas perkara.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pemenuhan unsur-unsur yang disangkakan dalam perkara dan koordinasi dengan CJS yang lebih intensif	Sudah dilaksanakan,	Koordinasi intens dengan CJS (Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan Wassidik)	Akhir tahun 2023

24. Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan realisasi capaian TW II dengan target TW II*

Tabel 31. Indeks RB BBPOM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal	Indeks RB BBPOM di Jakarta	84,4	-	-	-

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

Balai Besar POM di Jakarta telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2020 dan bertekad untuk mempertahankan dan meningkatkan menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Oleh karenanya dilakukan berbagai upaya peningkatan, inovasi dan terobosan untuk dapat meningkatkan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomo 90 Tahun 2021, Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen yaitu Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil seperti terlihat pada gambar berikut :

b. *Perbandingan realisasi capaian TW II dengan target tahun 2023*

Indeks RB diukur setiap tahun melalui penilaian Lembar Kerja Entitas dengan hasil yang disampaikan pada akhir tahun, sehingga belum tersedia data pada triwulan II.

25. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan realisasi capaian TW II dengan target TW II*

Tabel 32. Nilai AKIP BBPOM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	81	-	-	-

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang

lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:

- Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
- Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)

2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:

- Pemenuhan pengukuran (5%)
- Kualitas pengukuran (12,5%)
- Implementasi pengukuran (7,5%)

3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:

- Pemenuhan pelaporan (3%)
- Kualitas pelaporan (7,5%)
- Pemanfaatan pelaporan (4,5%)

4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:

- Pemenuhan evaluasi (2%)
- Kualitas evaluasi (5%)
- Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)

5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:

- Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
- Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
- Kinerja tahun berjalan (*benchmark*) (5%)

b. Perbandingan realisasi capaian TW II dengan target tahun 2023

Pada triwulan II tahun 2023, nilai AKIP BBPOM di Jakarta belum terdapat realisasi dan capaian dikarenakan merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang dinilai pada akhir tahun 2023.

Sasaran Strategis-9: Terwujudnya sumber daya manusia Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

26. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan realisasi capaian TW II dengan target TW II*

Tabel 33. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jakarta	84,75	-	-	-

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 (yang disiapkan oleh Biro Umum dan SDM) kepada seluruh pegawai (ASN) di Balai Besar POM di Jakarta

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

b. *Perbandingan realisasi dibandingkan target TW II dengan target tahun 2023*

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi dan capaian, nilai akan muncul pada akhir tahun

Sasaran Strategis-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10

27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. Perbandingan realisasi capaian TW II dengan target TW II

Tabel 35. persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87	-	-	-

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) atau Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

b. Perbandingan realisasi capaian TW II dengan target tahun 2023

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta triwulan II tahun 2023 belum dapat diperoleh nilai realisasi dan capaiannya dikarenakan indeks ini dapat diperoleh nilainya di akhir tahun 2023.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja pencapaian pernyataan kinerja

- Program regionalisasi Laboratorium yang dimulai tahun 2023 ini, khususnya untuk Laboratorium Obat yang mengerjakan sampel dengan kelas terapi Antiinfeksi umum, organ sensorik, dan Antineoplastik yang disampling dari seluruh Balai Besar/balai/Loka POM di Region 3 yaitu BBPOM di Jakarta (Koordinator), BBPOM di Serang, BBPOM di Bandung, BBPOM di Semarang, BBPOM di Yogyakarta, Loka POM di Tangerang, Loka POM di Tasikmalaya, Loka POM di Bogor, dan Loka POM di Banyumas. Dengan luasnya daerah/ lokasi sampling cukup menambah jenis sample dan sediaan yang diuji oleh Laboratorium Obat BBPOM di Jakarta sehingga ruang lingkup pengujian bertambah.
- Menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.

28. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal

a. Perbandingan realisasi capaian TW II dengan target TW II

Tabel 36. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta yang optimal	2,5	2,6	104,00	Memenuhi Ekspetasi

SIPT merupakan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu yang digunakan oleh BBPOM di Jakarta untuk melaporkan hasil pemeriksaan sampel, pengujian sampel dan pemeriksaan sarana kepada Badan POM secara online. Cara perhitungan data SIPT sebagai berikut Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM. Indeks ini mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup *email, sharing folder, dashboard* BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bagian/kelompok substansi maupun individu.

Dihitung Indeks pengelolaan data dan informasi UPT terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC (BPOM Command Centre)

Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan oleh UPT yaitu SPIMKer (Data Keracunan) dan SIPT. Data kasus keracunan diinput oleh rumah sakit maupun oleh BBPOM di Jakarta melalui aplikasi SPIMKer. Kemudian data tersebut diverifikasi oleh petugas BBPOM Jakarta dengan timeline 30 HK dari tanggal input aplikasi. Cara perhitungan data Spimker sebagai berikut:

2. Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional Badan POM dengan kriteria sebagai berikut:

2,26 – 3 : Optimal

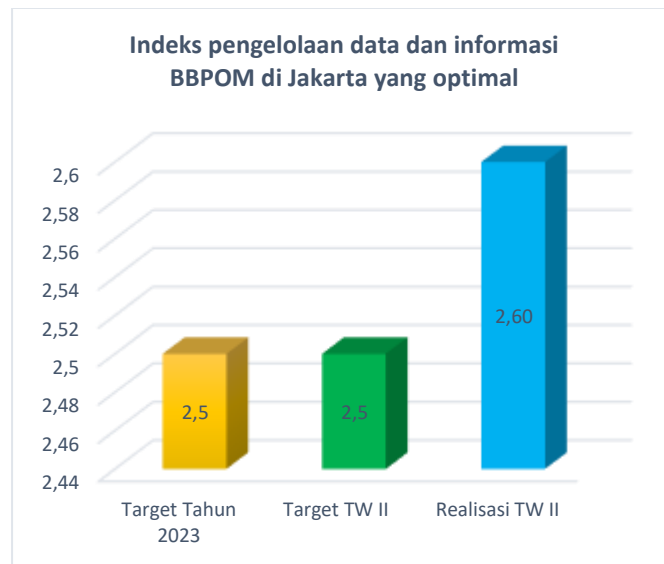
1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

b. Perbandingan realisasi dibandingkan target TW II dengan target tahun 2023

Target indikator “**Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta yang optimal**” TW II ini adalah 2.5 dengan realisasi indikator pada TW II adalah 2,6 dengan capaiannya yaitu 104% termasuk kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”. Jika disimpulkan sesuai dengan SK KaBPOM terbaru No.128 Tahun 2022 termasuk kategori “**Efektif**” tetap diperlukan monitoring dan evaluasi realisasi capaian pada triwulan selanjutnya dan sampai dengan akhir tahun 2023.



Gambar 23. Perbandingan Realisasi TW II dibandingkan dengan Target TW II dan Target Tahun 2023

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pemantauan Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta dilakukan oleh Tim IT yang memiliki *job description* yang jelas dan tercantum dalam SK Tim IT. Dalam rangka mengawal nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal, dilakukan monitoring setiap bulan terhadap pencapaian masing-masing komponen penyusun indeks sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan.

Komponen yang belum memenuhi target adalah nilai indeks data dan informasi yang dimutakhirkan di BOC/SIPT.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/ kegiatan yang menunjang pencapaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi, yaitu:

- Pembentukan Tim IT dalam rangka mengawal Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di BBPOM Jakarta dan dilakukan sosialisasi terkait komponen penilaian indeks pengelolaan data dan informasi

untuk meningkatkan pemahaman anggota Tim IT sehingga dapat disusun langkah-langkah yang tepat dalam mengawal nilai indeks pengelolaan data dan informasi

- Pemanfaatan *sharing folder* dilakukan dengan akses petugas pada saat pemeriksaan produk baik pada saat pemeriksaan di sarana maupun pemeriksaan penandaan obat sebagai tindak lanjut sampling produk. Pemanfaatan *sharing folder* sudah dilakukan dengan baik sehingga memperoleh nilai indeks 3.
- Pemantauan jumlah berita aktual dan viewer setiap bulan dengan jumlah minimal 10 berita aktual/ bulan dengan masing-masing minimal 101 *viewer*/berita aktual
- Verifikasi dan tindak lanjut petugas Aplikasi Spimker secara tepat waktu sehingga diperoleh nilai indeks pemutakhiran spimker yang optimal (3)
- Pendampingan Pusdatin dalam penggunaan fitur baru pada SIPT berkontribusi terhadap meningkatnya kompetensi
- Regionalisasi laboratorium mempengaruhi ketepatan waktu input sampling dan hasil uji pada SIPT, hal ini disebabkan diperlukan waktu tambahan untuk konsolidasi data

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Dilakukan upaya pemenuhan nilai masing-masing dari komponen pendongkrak nilai indeks pengelolaan data diantaranya adalah pemanfaatan email corporate, spimker, <i>sharing folder</i> pemanfaatan BOC, dan SIPT	Dalam Progress	Diperlukan koordinasi dengan seluruh tim IT	TW III-IV 2023

Sasaran Strategis-11: Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11

29. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan realisasi capaian TW II dengan target TW II

Tabel 37. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	80	77,43	96,79	Belum Memenuhi Ekspetasi

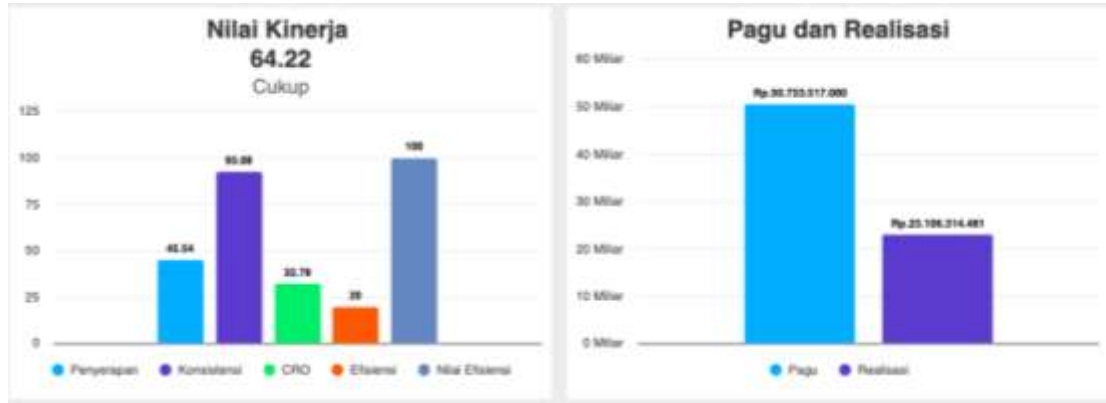
Evaluasi Kinerja Anggaran berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan No. 2/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Penilaian atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dilakukan dengan memperhitungkan capaian atas pengelolaan anggaran dan indikator kinerja anggaran. Capaian atas pengelolaan anggaran tersebut merupakan nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA) kementerian negara/lembaga yang meliputi aspek implementasi, aspek manfaat, dan/ atau aspek konteks. Adapun capaian atas indikator kinerja anggaran merupakan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) kementerian negara/Lembaga.

Nilai EKA kementerian negara/lembaga dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada laporan kinerja ini, evaluasi kinerja anggaran dibahas berdasarkan aspek implementasi yaitu Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi, dilakukan dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut: capaian *output*, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

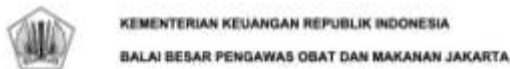
Bobot Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari 4 Indikator yaitu:

No	Indikator	Bobot
1	Capaian Output	43,5%
2	Efisiensi	28,6%
3	Konsistensi Penyerapan Anggaran	18,2%
4	Penyerapan Anggaran	9,7%

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dihitung berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Nilai EKA dapat dilihat pada Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), sedangkan nilai IKPA dapat diakses melalui Aplikasi Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).



Gambar 24. Nilai EKA BBPOM Jakarta per 10 Juli 2023 pada aplikasi SMART DJA (<https://monev.kemenkeu.go.id/app2023/satker/laporansatker>, 10-07-23 08:59:19)



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

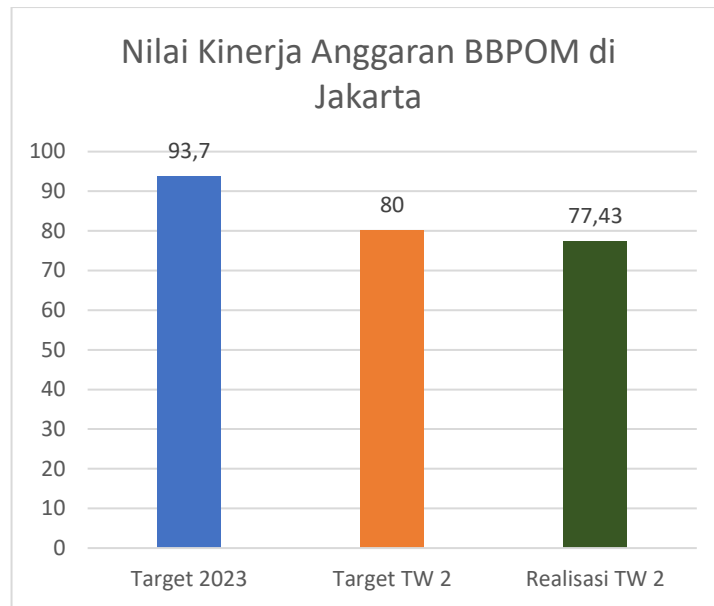
Sampai Dengan: 31/01

No	Kode KPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DPA	Deviasi Halaman di DPA	Pengerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengeluaran UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output				
1	175	063	432747	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA.	NSM	100.00	83.87	87.57	100.00	85.45	88.02	100.00	100.00	87.38	100%	87.38	
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	12.00	8.40	19.51	10.00	9.55	9.80	5.00	25.00				
					Nilai Aspek	81.88				88.21			100.00				

Gambar 25. Nilai IKPA BBPOM Jakarta triwulan 2 tahun 2023 pada aplikasi OMSPAN (<https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#sintesa/NilaiIKPASatker/indikatorKinerja>, 05-07-23 08:59:19)

b. Perbandingan realisasi dengan target TW II dan target tahun 2023

Target indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta” pada triwulan 2 ini adalah 80 dengan realisasi indikator sebesar 77,43 dengan capaiannya yaitu 96,79% termasuk kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” dan termasuk kategori “Tidak Efektif”. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu 93,7, maka capaian triwulan 2 tahun 2023 sebesar 82,64%. Oleh karena itu diperlukan monitoring dan evaluasi realisasi capaian pada triwulan selanjutnya dan sampai dengan akhir tahun 2023.



Gambar 26. Perbandingan Realisasi TW II dibandingkan dengan Target TW II dan Target Tahun 2023

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Variabel yang terkait dengan rendahnya nilai EKA terutama dipengaruhi dengan masih rendahnya capaian output dan efisiensi. Oleh karena itu, telah dilakukan upaya meningkatkan capaian kinerja dan efisiensi.
2. Variabel yang terkait dengan nilai IKPA antara lain:
 - a. Penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual Non Belanja Pegawai tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai pada triwulan I. Terdapat satu tagihan yang terlambat karena kurangnya koordinasi internal, sehingga telah diupayakan meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pihak terkait untuk penyelesaian pembayaran.
 - b. Terdapat deviasi deviasi yang cukup besar pada belanja modal bulan Februari dan Maret yang disebabkan percepatan realisasi pengadaan. Hal ini menyebabkan menurunnya/ berkurangnya nilai Halaman III DIPA. Untuk itu, telah dilaksanakan dilaksanakan penyesuaian Halaman III DIPA pada periode awal triwulan II.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program yang berpengaruh positif terhadap nilai kinerja anggaran adalah:

1. Pelaporan kepada KPPN secara tepat waktu terkait penyampaian data kontrak, LPJ, SPM
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan realisasi *output* secara berkala

e. **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Perlu dilakukan penyusunan RPD dan monev pelaksanaan kegiatan secara akurat agar target RPD dapat tercapai	Dalam Progress	- Mengoptimalkan capaian output untuk meningkatkan nilai efisiensi - Melaksanakan revisi halaman III DIPA	Desember 2023

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Jakarta per 30 Juni 2023 dengan pagu awal adalah sebesar 45,91% dari pagu Rp48.085.117.000 menurun menjadi 43,52% dari pagu Rp50.733.517.000, karena terdapat transfer masuk anggaran sebesar Rp2.648.400.000. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor : S-1040/MK.02/2022 Tanggal 9 Desember 2022 tentang pencadangan anggaran/automatic adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 dan tambahan anggaran di bulan Juni 2023 maka total automatic adjustment Balai Besar POM di Jakarta menjadi sebesar 5.133.890.000. Realisasi anggaran Balai Besar POM di Jakarta per 30 Juni 2023 dengan pagu yang telah dikurangi automatic adjustment adalah sebesar 48,42% dari pagu Rp45.629.627.000

Berdasarkan jenis belanja, realisasi tertinggi adalah belanja modal 70,58% dan belanja pegawai sebesar 50,28%, sedangkan realisasi terendah adalah belanja barang sebesar 35,48%. Dibandingkan dengan target penyerapan anggaran per triwulan II, berdasarkan pasal 9 PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, belanja modal minimal 40%, belanja pegawai minimal 50%, dan belanja barang minimal 50%, terdapat selisih lebih sebesar +30,58% pada belanja modal dan +0,28 pada belanja pegawai. Perlu mendapat perhatian adalah pada belanja barang masih karena masih belum maksimal dan terdapat selisih kurang sebesar -14,52%

Apabila dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) s.d 30 Juni 2023 sebesar 43,83%, maka realisasi periode ini masih berada di bawah target penyerapan anggaran triwulanan yang ditetapkan (target periode ini sebesar 45,50%);



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : III 4.8.23

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Mutasi	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bantuan	LainLain		Transfer
1	432747 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	PAGU	18,125,800,000	28,058,982,000	3,548,425,000	0	0	0	0	0	0	50,733,517,000
		REALISASI	9,816,890,883 (50.28%)	9,954,762,497 (35.48%)	2,595,359,568 (70.58%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22,077,012,946 (43.52%)
		SISA	9,308,909,117	18,104,219,503	1,044,065,434	0	0	0	0	0	0	28,656,504,054
GRAND TOTAL		PAGU	18,125,800,000	28,058,982,000	3,548,425,000	0	0	0	0	0	50,733,517,000	
		REALISASI	9,816,890,883 (50.28%)	9,954,762,497 (35.48%)	2,595,359,568 (70.58%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22,077,012,946 (43.52%)	
		SISA	9,308,909,117	18,104,219,503	1,044,065,434	0	0	0	0	0	28,656,504,054	

Gambar 26. Realisasi Belanja Balai Besar POM di Jakarta sampai dengan 30 Juni 2023
(https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#span/BA_ES1/DataRealisasiKegiatanBAES1_05-07-23_13:44:19)

Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jakarta dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Peningkatan penggunaan sistem teknologi informasi komunikasi dalam pengelolaan keuangan
- Peningkatan kompetensi petugas pengelola keuangan terhadap kepatuhan dalam pengelolaan keuangan

Realisasi anggaran tersebut telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta pada Triwulan II Tahun 2023 untuk 11 sasaran strategis yang diukur melalui 29 indikator kinerja utama dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja, 13 (tiga belas) indikator mencapai target dengan kriteria **"Memenuhi Ekspektasi"** ($100\% < x < 120\%$); 5 (lima) indikator dengan kriteria **"Belum Memenuhi Ekspektasi"** yaitu ($80\% < x < 100\%$); 2 (dua) indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori **"Tidak dapat disimpulkan"**,
2. Terdapat 5 (lima) sasaran strategis dengan kriteria **"Memenuhi Ekspektasi"** yaitu diantaranya sasaran strategis. Hasil capaian sasaran strategis dapat ditarik kesimpulan **"Efektif"** adalah sebagai berikut:
 - 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta
 - 2) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta
 - 3) Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta
 - 4) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta
 - 5) Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
3. Terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan kriteria **"Belum Memenuhi Ekspektasi"**. Hasil capaian sasaran strategis **"Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel"**
4. Terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan kriteria **"Tidak Dapat Disimpulkan"** yaitu diantaranya sasaran strategis **"Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta"**.

4.2. Saran

Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan dimasa yang akan datang sebagai berikut:

1. Peningkatan konsistensi dan akuntabilitas pelaksanaan tata Kelola kinerja dan anggaran pada triwulan berikutnya.
2. Monitoring dan evaluasi terus menerus akan dilakukan disisa triwulan tahun 2023
3. Konsistensi revisi Halaman III Dipa yang perlu dikawal ketat
4. Melakukan optimalisasi kinerja agar semua target IKU tercapai

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BBPOM di Jakarta Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BBPOM di Jakarta		
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	82
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	89
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88.8
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78.33
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.55

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.8
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	88
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	28
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	61
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	84.4
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	81
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84.75
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93.7

Lampiran 2. RAPK BBPOM di Jakarta Tahun 2023



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Jakarta
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	508.813.550,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	284.565.030,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	508.813.550,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	284.565.030,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	50.866.400,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												89	372.857.300,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												88,8	37.455.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												79,33	434.766.850,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												92	176.000.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	374.182.000,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	374.182.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	259.500.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	149.257.000,00	
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	599.107.000,00	
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT						4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	434.786.850,00	
16.	Persentase UMKH yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	3.3	10	24.2	37.5	37.5	38.3	38.3	38.3	39.2	65.8	95.8	79	76.029.000,00
17.	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan			95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	4.697.413.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	10	20	25	38	42	49	56	67	78	87	96	88	703.121.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	5	10	17.5	26.25	32.5	41.25	47.5	50	52.5	60	80	28	1.059.366.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	436.125.800,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	265.726.500,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		5	10	15	20	30	35	40	45	50	55	61	1.170.678.000,00
23.	Indeks RB UPT											84.4	318.155.000,00	
24.	Nilai AKIP UPT											81	54.019.000,00	
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											84.75	28.368.739.000,00	

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP											87	5.877.061.000, 00	
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	71.925.000, 00	
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		76	77	78	79	80	82	84	86	88	90	93,7	28.600.000, 00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	10	15	40	55	65	75	80	85	100	100	4	106.629.000, 00
Total												48.085.117.000, 00		



BADAN POM



Balai Besar POM di Jakarta
Jl. As'syafiiyah No.133
Cilangkap - Jakarta Timur 13870